



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 89 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN NGAWI
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf b dan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi dan disempurnakan ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Republik Indonesia (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
26. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
27. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
28. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
29. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
30. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional Presiden Republik Indonesia;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
32. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 211);

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2036);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);

41. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023;
42. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
43. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 02 Seri D);
44. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 41 Seri E);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 10);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ngawi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2012 Nomor 19);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 274);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 275);

49. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 277);
50. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 149 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 75 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 75);
51. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 17 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 17);
52. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 25).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN NGAWI TAHUN 2024.

Pasal 1

Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi Tahun 2024 disusun berpedoman pada:

- a. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
- b. hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu; dan
- c. hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Pasal 3

Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi Tahun 2024 menjadi pedoman dalam penyusunan RKA-SKPD.

Pasal 4

- (1) Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN
 - b. BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
 - c. BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
 - d. BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
 - e. BAB V : PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

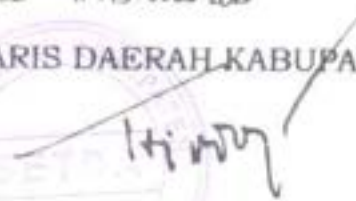
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 11 Agustus 2023



Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 11 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,


MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2023 NOMOR 89

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI NGAWI

NOMOR 99 TAHUN 2023

TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT

DAERAH PADA DINAS KOMUNIKASI,

INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

KABUPATEN NGAWI TAHUN 2024

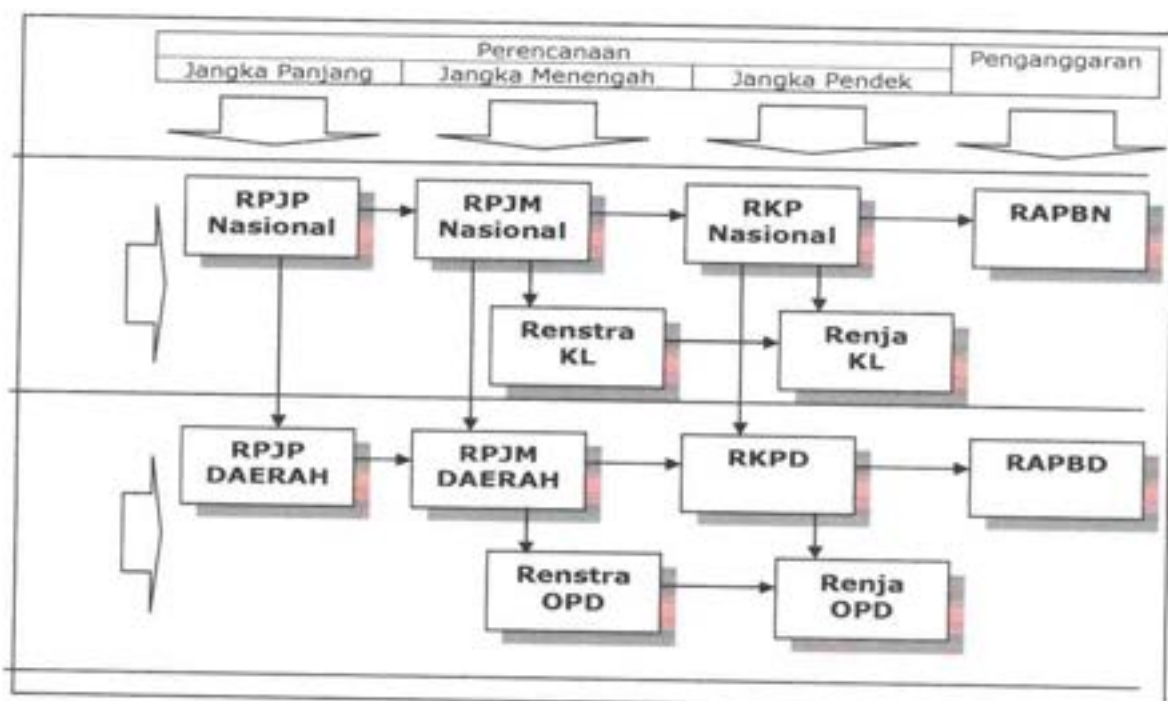
BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan organisasi perangkat daerah yang memuat visi, misi, tujuan, kebijakan, dan strategi yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di daerah, dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

Ruang lingkup Rencana Kerja (RENJA) adalah pelaksanaan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dalam 1 (satu) tahun dengan memperhitungkan faktor-faktor penentu keberhasilan yang ada, dan tujuan pembangunan yang realistis yang dapat dicapai. RENJA Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi Tahun 2024 merupakan rencana kerja yang akan dilaksanakan selama satu tahun yang sudah tertuang dalam RKPD Kabupaten Ngawi dan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2016 - 2021 yang dijelaskan dengan diagram alir sebagai berikut:



Proses Penyusunan Renja PD adalah sebagai berikut ;

1. Pembentukan tim penyusun Renja PD

Anggota tim penyusun Renja PD adalah pejabat dan staf PD yang benar-benar siap untuk bertugas secara penuh dalam menyiapkan dokumen Renja PD. Dengan demikian yang dipilih adalah yang punya kesiapan waktu dan kemampuan teknis yang cukup.

2. Orientasi mengenai Renja PD

Orientasi mengenai Renja PD perlu diberikan kepada tim untuk penyamaan persepsi terkait teknis penyusunan Renja PD, hubungan Renja PD dengan dokumen perencanaan lainnya, mengetahui aspek-aspek regulasi yang terkait dengan perencanaan dan penganggaran daerah.

3. Penyusunan Agenda Kerja

Jangka waktu penyelesaian dokumen Renja PD sangat ketat dan padat. Untuk itu perlu disusun agenda kerja yang memerinci setiap tahapan kegiatan penyusunan dokumen Renja PD dengan satuan waktu sejak persiapan, sampai dengan penetapan Renja PD.

4. Penyiapan Data dan Informasi

Setiap usulan program dan kegiatan perlu didukung data atau informasi yang memadai dan akurat dari sumber yang dapat dipertanggung-jawabkan. Data atau informasi dikumpulkan sedemikian rupa hingga memperlihatkan secara jelas capaian kinerja penyelenggaraan urusan wajib / pilihan pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawab sesuai dengan tugas fungsi PD

Penyusunan rancangan Renja PD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja PD yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja PD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja PD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting PD, evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra PD.

Berkaitan hal tersebut acuan dalam penyusunan rencana kerja 2024 adalah :

1. Evaluasi capaian kinerja tahun 2022 dan perkiraan capaian tahun 2023. Upaya penyelesaian target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2016-2021
2. Prioritas Pembangunan Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 dan isu-isu strategis yang berkembang saat ini dan prediksi masa mendatang
3. Sasaran pokok pada RPJP Kabupaten Ngawi Tahun 2005 – 2025 pada tahapan RPJMD ke – 6 yaitu pengembangan infrastruktur yang kuat guna menunjang investasi dan perekonomian

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yaitu dalam rangka pengembangan otonomi daerah khususnya dalam pembantuan dibidang Komunikasi dan Informatika di lingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi. Dalam mewujudkan hal tersebut Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian diberi kewenangan penuh dalam mengelola manajemen Komunikasi dan Informatika dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Adapun dasar hukum yang menjadi landasan dalam pembentukan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas-tugasnya adalah :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi ;
2. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 17 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;

Tugas Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah *pembantuan dibidang* Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (sesuai dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 17 Tahun 2022). Adapun yang dimaksud manajemen Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah keseluruhan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut maka Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian mempunyai fungsi yaitu :

- a. peningkatan implementasi Reformasi Birokrasi pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
- b. peningkatan implementasi e-Government dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;
- c. peningkatan sistem data yang terintegrasi secara sistematis;
- d. peningkatan keamanan informasi Pemerintah Daerah;
- e. perumusan kebijakan di bidang informasi dan komunikasi publik, bidang aplikasi informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- f. pengelolaan layanan informasi publik, layanan hubungan masyarakat dan media, pengelolaan komunikasi publik untuk mendukung kebijakan Nasional dan Pemerintah Daerah;
- g. pengelolaan layanan tata kelola, pengembangan aplikasi informatika dan layanan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkup Pemerintah Daerah;
- h. pengelolaan layanan manajemen data statistik sektoral sebagai walidata;
- i. pengelolaan layanan persandian dan keamanan informasi;
- j. perumusan norma, standar, prosedur dan kriteria, penyelenggaraan urusan komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- k. pelaksanaan pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi urusan komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- l. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan urusan komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Aplikasi dan Informatika, Statistik, Persandian dan Keamanan Informasi;
- n. pelaksanaan administrasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian; dan
- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana tersebut diatas, Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian diberikan kewenangan, yaitu :

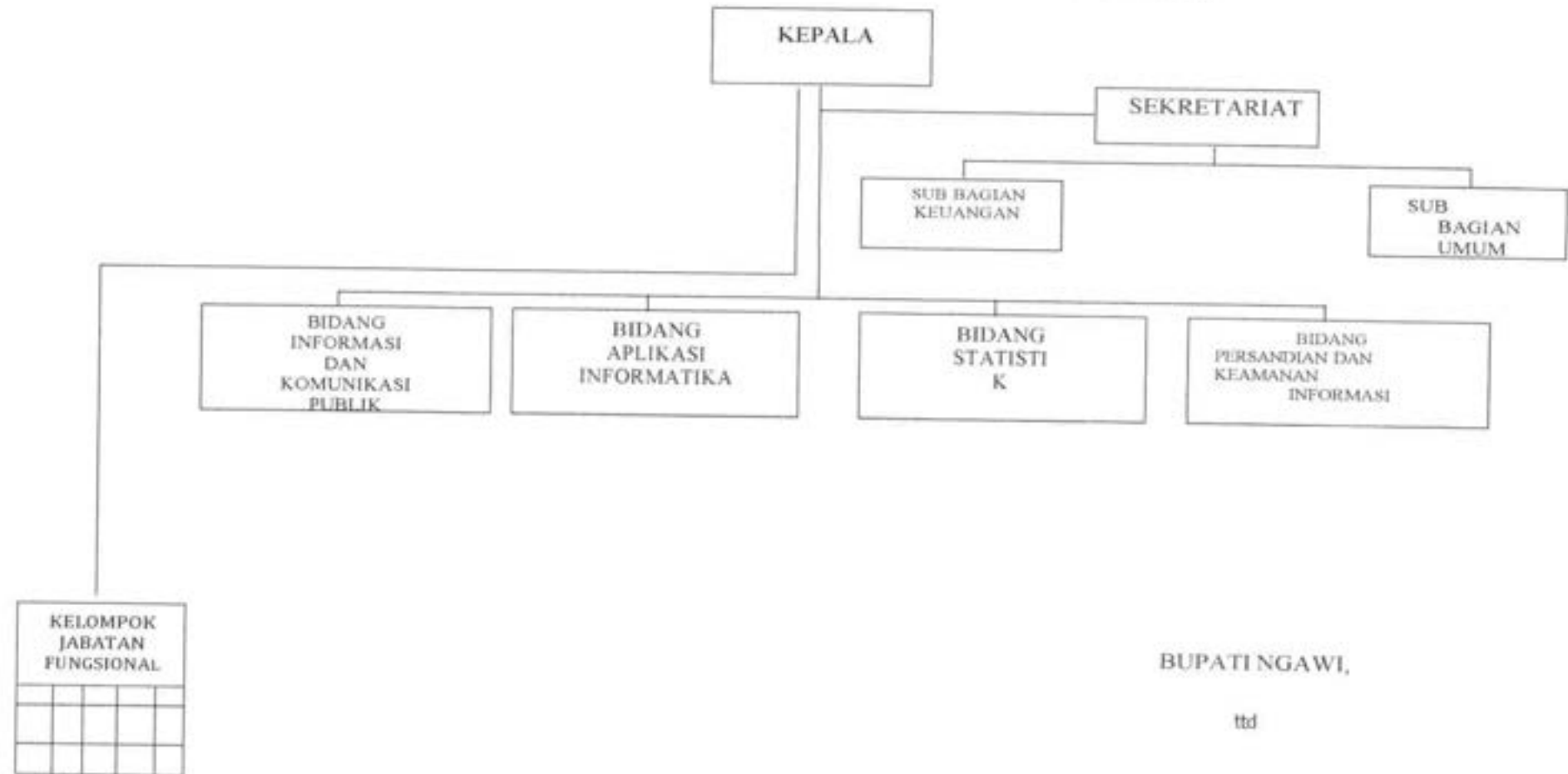
- a. pengelolaan opini, aspirasi publik dan pengaduan masyarakat, pengelolaan hubungan masyarakat dan layanan media;
- b. pengelolaan komunikasi publik;
- c. penyelenggaraan ekosistem Teknologi Informasi dan Komunikasi *Smart City*, layanan nama domain dan sub domain, pelayanan publik

Government Chief Information Officer, pengembangan sumber daya Teknologi Informasi Komunikasi;

- d. pengelolaan aplikasi umum, khusus dan pengembangannya yang terintegrasi;
- e. pengelolaan infrastuktur, data center, layanan pengembangan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah;
- f. pengelolaan analisis perencanaan data serta pelaksanaan sebagai walidata;
- g. pengelolaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagai walidata;
- h. pengelolaan tata kelola persandian; dan
- i. pengelolaan keamanan informasi.

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian seperti dalam lampiran berikut;

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI, INFOMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN



BUPATINGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

Dengan telah diberikannya kewenangan penuh kepada Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian dalam mengelola manajemen Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian maka sangat diharapkan program-program yang telah direncanakan dapat berjalan dengan baik dan lancar sehingga akan tercipta manajemen Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian yang handal, profesional dan akuntabel serta mampu bersaing dalam era globalisasi dan informasi yang semakin berkembang dan maju. Agar tugas dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian dapat berjalan dengan baik dan lancar maka dalam pelaksanaannya dibagi dalam 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) Bidang yang mempunyai tugas dan fungsi masing-masing. Untuk lebih jelasnya dalam pembagian tugas dan fungsi dari Sekretariat dan Bidang dapat dilihat dalam tabel berikut:

Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. koordinasi kegiatan;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran;
- c. pengumpulan dan pengolahan data serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- d. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hukum, organisasi, hubungan masyarakat, serta kearsipan dan dokumentasi;
- e. penyelenggaraan pengelolaan barang milik Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sekretariat membawahi:

- a. Sub Bagian Umum; dan
- b. Sub Bagian Keuangan.

(1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas:

- a. menyiapkan dan melaksanakan urusan tata usaha;
- b. menyiapkan dan melaksanakan urusan kepegawaian;

- c. menyiapkan dan melaksanakan urusan rumah tangga;
- d. menyiapkan dan melaksanakan urusan tata persuratan dan kearsipan;
- e. menyiapkan dan melaksanakan urusan kehumasan;
- f. melakukan pengelolaan dan inventarisasi barang milik daerah;
- g. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja;
- h. menyiapkan bahan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara;
- i. mengkoordinasikan penyiapan bahan Reformasi Birokrasi dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah; dan
- j. melaksanakan tugas-tugas lain Sub Bagian Umum yang diberikan oleh Sekretaris.

(2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:

- a. pelaksanaan urusan tata laksana keuangan;
- b. pelaksanaan urusan perbendaharaan dan gaji;
- c. pelaksanaan urusan verifikasi dan akuntansi; dan
- d. pelaksanaan urusan pelaporan keuangan.

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan rencana dan pelaksanaan peningkatan pengembangan komunikasi, informasi dan media massa sebagai sarana publikasi;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pengelolaan opini dan aspirasi publik, informasi publik, hubungan masyarakat dan layanan media, pengelolaan komunikasi publik untuk mendukung kebijakan Nasional dan Pemerintah Daerah;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan informasi publik, hubungan masyarakat dan layanan media, pengelolaan komunikasi publik untuk mendukung kebijakan Nasional dan Pemerintah Daerah;

- d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang penyelenggaraan informasi publik, hubungan masyarakat dan layanan media, pengelolaan komunikasi publik untuk mendukung kebijakan Nasional dan Pemerintah Daerah;
- e. pelaksanaan koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan dan layanan informasi komunikasi publik yang mencakup penyelenggaraan informasi publik, hubungan masyarakat dan layanan media, pengelolaan komunikasi publik untuk mendukung kebijakan Nasional dan Pemerintah Daerah;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Informasi dan Komunikasi Publik; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan bidang tugasnya.

Bidang Aplikasi Informatika

Bidang Aplikasi Informatika mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan rencana dan pelaksanaan program dalam rangka terwujudnya layanan e-Government dan pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang baik, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik, dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi komunikasi Smart City, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer*;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan layanan tata kelola, pengembangan aplikasi informatika dan layanan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkup Pemerintah Daerah;
- c. pelaksanaan kebijakan layanan tata kelola, pengembangan aplikasi informatika dan layanan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkup Pemerintah Daerah;
- d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan layanan tata kelola, pengembangan aplikasi

- informatika dan layanan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkup Pemerintah Daerah;
- e. penyiapan bahan koordinasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi layanan tata kelola, pengembangan aplikasi informatika dan layanan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkup Pemerintah Daerah;
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan Bidang Aplikasi Informatika; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan bidang tugasnya.

Bidang Statistik

Bidang Statistik mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan rencana dan pelaksanaan dalam rangka terwujudnya standarisasi dan integrasi data statistik sektoral;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan layanan penetapan standar format data, metadata, interoperabilitas data, interkoneksi data, *Application Programming Interface* dalam mendukung layanan serta peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia sebagai walidata;
- c. pelaksanaan kebijakan layanan penetapan standar format data, metadata, interoperabilitas data, interkoneksi data, *Application Programming Interface* dalam mendukung layanan serta peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia sebagai walidata;
- d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria layanan penetapan standar format data, metadata, interoperabilitas data, interkoneksi data, *Application Programming Interface* dalam mendukung layanan serta peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia sebagai walidata;
- e. penyiapan bahan koordinasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di layanan penetapan standar format data, metadata, interoperabilitas data, interkoneksi data, *Application Programming*

Interface dalam mendukung layanan serta peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia sebagai walidata;

- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pada bidang Statistik; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan bidang tugasnya.

Bidang Persandian dan Keamanan Informasi

Bidang Persandian dan Keamanan Informasi mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan rencana dan pelaksanaan dalam rangka penyelenggaraan keamanan informasi e-Government;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang Persandian dan Keamanan Informasi, meliputi Tata Kelola Persandian dan Keamanan Informasi;
- c. pelaksanaan kebijakan bidang Persandian dan Keamanan Informasi, meliputi Tata Kelola Persandian dan Keamanan Informasi;
- d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Persandian dan Keamanan Informasi;
- e. penyiapan bahan koordinasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Persandian dan Keamanan Informasi;
- f. pengelolaan informasi berklasifikasi;
- g. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional Sandiman;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan Bidang Persandian dan Keamanan Informasi; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan bidang tugasnya.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja ini berpedoman pada :

- 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat 6;
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

14. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.4815);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Republik Indonesia (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
29. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi CoronaVirus Disease 2019 (COVID-19) dan Atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan Atau Stabilitas Sistem Keuangan;
30. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

31. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
32. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
33. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
34. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten / Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
35. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional Presiden Republik Indonesia;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
46. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5 -1317 Tahun 2023;
47. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
48. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 2 Seri D);
49. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 41 Seri E);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi

- Tahun 2011 Nomor 10);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ngawi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2012 Nomor 19);
 52. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 8);
 53. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 9);
 54. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender Kabupaten Ngawi (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 1);
 55. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 25);
 56. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 149 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi Tahun 2021 - 2026 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 75 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 75);
 57. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 17 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja adalah sebagai pedoman bagi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi institusi.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja adalah :

1. Mengoptimalkan peran dan fungsi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
2. Mewujudkan manajemen Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang handal, profesional dan akuntabel serta mampu bersaing dalam era globalisasi dan informasi;
3. Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan pembangunan daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Tahun 2024 disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I menjelaskan tentang gambaran umum penyusunan rancangan Renja OPD agar substansi pada bab – bab berikutnya dapat dipahami dengan baik, terdiri dari ;

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB	II	HASIL EVALUASI RENJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN LALU
		Bab II Menjelaskan tentang hasil evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian renstra OPD, capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator yg sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM ,maupun terhadap IKK, isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD serta review terhadap rancangan awal RKPD, terdiri dari ;
		2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan capaian renstra OPD
		2.2 Analisis kinerja pelayanan OPD
		2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD
		2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD
BAB	III	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
		Bab III menjelaskan tentang telaahan terhadap kebijakan nasional terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD, Tujuan dan sasaran Renja OPD, Program dan Kegiatan
		3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional
		3.2 Tujuan dan sasaran Renja OPD
BAB	IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		Bab IV menjelaskan tentang faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar rekapitulasi program kegiatan dan sub kegiatan.
BAB	V	PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS KOMUNIKASI,INFORMATIKA,STATISTIK DAN PERSANDIAN TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

Capaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian secara bertahap mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 prioritas utama adalah pembangunan infrastruktur terkait pembangunan jaringan Fiber Optik dalam rangka menunjang kelancaran ketersediaan jaringan Informasi teknologi di Kabupaten Ngawi dalam rangka untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur TIK dan layanan publik.

- Pembangunan infrastruktur Fiber Optic di 27 OPD
- Pembangunan Data Center
- Pembangunan Mini Command Center
- Pengadaan Bandwidth untuk kecukupan seluruh OPD dan Kecamatan
- Penyusunan Dashboard eksekutif dalam rangka persiapan penyusunan Data Statistik Sektorial Satu Data Indonesia
- Penerapan sistem elektronik dalam pemerintahan
- Peningkatan pengelolaan layanan publik sesuai standart.
- Penerapkan manajemen SPBE secara efisien, efektif dan berkesinambungan dengan langkah mempercepat implementasi SPBE yang terintegrasi meliputi ; integrasi perencanaan, penganggaran, pengadaan, integrasi data kepegawaian, integrasi data kearsipan, integrasi pengaduan publik, pembangunan pusat data nasional untuk meningkatkan nilai SPBE 2,98 agar menjadi lebih baik lagi.
- Memberikan pelayanan dan informasi berbasis android
- Pengadaan Bandwidth pasar untuk aplikasi e – retribusi untuk pasar di Kabupaten Ngawi.

- Fasilitasi video conference untuk pimpinan daerah dan OPD.
- Fasilitasi internet gratis di ruang publik.
- Berbagai program acara di Radio Suara Ngawi dalam rangka penyebarluasan informasi kepada masyarakat terkait penyelenggaraan pemerintah daerah diberbagai sektor yaitu pendidikan, kesehatan, perekonomian. Beberapa program yang diselenggarakan seperti Talk show, Dialog Interaktif, UBLIK (Umyek Bareng Lintas Komunitas), NGEMPER (Ngejam Perempatan Kartonyono) INSPIRASI dan masih banyak yang lain.

Berikut adalah capaian target kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2022 :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Target kinerja atas indikator persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun adalah 100 %, realisasinya sebesar 100% sehingga capaian kinerjanya 100%

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Target kinerja atas indikator persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun adalah 100 %, realisasinya sebesar 100% sehingga capaian kinerjanya 100%

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Target kinerja atas indikator persentase dokumen dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu adalah 100 %, realisasinya sebesar 100% sehingga capaian kinerjanya 100%

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Target kinerja atas indikator persentase ASN yang terpenuhi administrasi kepegawaiannya dalam setahun adalah 100 %, realisasinya sebesar 100% sehingga capaian kinerjanya 100%

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Target kinerja atas indikator persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum dalam setahun adalah 100 %, realisasinya sebesar 100% sehingga capaian kinerjanya 100%

- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Target kinerja atas persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan sesuai dengan kebutuhan dalam setahun adalah 100 %, realisasinya sebesar 100% sehingga capaian kinerjanya 100%.
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Target kinerja atas persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun adalah 100 %, realisasinya sebesar 100% sehingga capaian kinerjanya 100%.
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Target kinerja atas persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara dalam setahun adalah 100 %, realisasinya sebesar 100% sehingga capaian kinerjanya 100%.

2. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

Target kinerja atas indikator persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah, counter narasi negatif, hoax, dan informasi misleading terhadap pemerintah daerah yang didiseminasikan sesuai dengan strategi komunikasi adalah 75 %, realisasinya sebesar 75% sehingga capaian kinerjanya 100%.

- a. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Target kinerja atas indikator persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota adalah 75 %, realisasinya sebesar 75% sehingga capaian kinerjanya 100%.
Target kinerja atas indikator persentase Informasi Publik yang disediakan dan diumumkan oleh Provinsi dan kab/kota sesuai amanat

UU No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik adalah 75 %, realisasinya sebesar 75% sehingga capaian kinerjanya 100%.

Target kinerja atas indikator persentase Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Tingkat Kecamatan adalah 80 %, realisasinya sebesar 80% sehingga capaian kinerjanya 100%.

3. PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA

Target kinerja atas indikator persentase Layanan E-Government Yang Terintegrasi adalah 80 %, realisasinya sebesar 80% sehingga capaian kinerjanya 100%.

- a. Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Target kinerja atas indikator persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo adalah 80 %, realisasinya sebesar 80% sehingga capaian kinerjanya 100%.

Target kinerja atas indikator persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar adalah 80 %, realisasinya sebesar 80% sehingga capaian kinerjanya 100%.

- b. Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Target kinerja atas indikator persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik adalah 80 %, realisasinya sebesar 80% sehingga capaian kinerjanya 100%.

Target kinerja atas indikator persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah adalah 80 %, realisasinya sebesar 80% sehingga capaian kinerjanya 100%.

Target kinerja atas indikator persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasi/replikasi inovasi yang mendukung smart city sesuai dengan Masterplan adalah 80 %, realisasinya sebesar 80% sehingga capaian kinerjanya 100%.

4. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

Target kinerja atas indikator persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah adalah 100 %, realisasinya sebesar 100% sehingga capaian kinerjanya 100%.

Target kinerja atas indikator persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah adalah 100 %, realisasinya sebesar 100% sehingga capaian kinerjanya 100%.

a. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

Target kinerja atas indikator persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral adalah 100 %, realisasinya sebesar 100% sehingga capaian kinerjanya 100%.

Target kinerja atas indikator persentase kelengkapan metadata indikator sektoral adalah 100 %, realisasinya sebesar 100% sehingga capaian kinerjanya 100%.

Target kinerja atas indikator persentase survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS adalah 100 %, realisasinya sebesar 100% sehingga capaian kinerjanya 100%.

5. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

Target kinerja atas indikator persentase Perangkat Daerah Yang Telah Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi Perangkat Daerah adalah 100 %, realisasinya sebesar 100% sehingga capaian kinerjanya 100%.

a. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Target kinerja atas indikator persentase OPD yang diselenggarakan pengamanan sesuai standard adalah 100 %, realisasinya sebesar 100% sehingga capaian kinerjanya 100%.

b. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

Target kinerja atas indikator persentase OPD yang dilakukan pengamanan persandian berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi

Sandi (PHKS) yang ditetapkan adalah 100 %, realisasinya sebesar 100% sehingga capaian kinerjanya 100%.

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian selanjutnya dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagaimana terlampir.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Perangkat Daerah
dan Pencapaian Rencana DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN s/d Tahun 2023
Kabupaten Ngawi

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Lembar :

Lembar :

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Rencana PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Dengan Tahun 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Laki (n- 1)			Target Program dan Kegiatan (Rencana Perangkat Daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Rencana Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Rencana Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana (%)
1							2	3	4	5			6	7
2	16			URURAN KOMUNIKASI INFORMATIKA										
2	16	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	100 %		100	100		100	100		100
2	16	01	2.01	Pencanangan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun		100	100		100	100		100	
2	16	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Pencanangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pencanangan Perangkat Daerah	11 Dokumen	11,00	Dokumen	11,00	Dokumen	100	11 Dokumen	100%
2	16	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	4,00	Dokumen	4,00	Dokumen	100	1 Dokumen	100%
2	16	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	0	dok	0 dok		1 Dokumen	100%	
2	16	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	0	dok	0 dok		2 Dokumen		
2	16	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen					2 Dokumen	100%	
2	16	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	6,00	Laporan	6,00	Laporan	100	7 Laporan	100%
							0	laporan	0 laporan	0 laporan				
2	16	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu	100%					100	100%	100%	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Rencana PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluasan Kegiatan s/d Dengan Tahun 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-1)			Target Program dan Kegiatan (Rencana Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
										Target Rencana Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Rencana Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana (%)	
2	16	01	2.02	01	Pemeliharaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen pengajuan gaji dan tunjangan ASN dan non ASN yang disetujui	26 Dokumen	26,00	orang	26,00	orang	100	26 Dokumen	26 Dokumen	100%	
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1430 Orang/bln	1.561,00	Dokumen	1.561,00	Dokumen	100	1430 Orang/bln	1430 Orang/bln		
2	16	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1,00	laporan	1,00	laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	100%	
2	16	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	50 Laporan	48,00	laporan	48,00	laporan	100	50 Laporan	50 laporan	100%	
								2,00	laporan	2,00	laporan	100			100%	
2	16	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang terpenuhi administrasi kepegawaianannya dalam setahun	100%		100	100	100	100			100	
2	16	01	2.05	01	Pengadaan Paket Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Paket Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket						1 Paket	1 Paket	100%	
2	16	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan		57,00	orang	57,00	orang	100			100%	
2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum dalam setahun			100	100	100	100			100	
2	16	01	2.06	01	Pemeliharaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	100	%	100	%	100	100	1 Paket	1 Paket	100%
2	16	01	2.06	02	Pemeliharaan Perakitan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Perakitan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	100	%	100	%	100	100	1 Paket	1 Paket	100%
2	16	01	2.06	03	Pemeliharaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	390,00	kotak	390,00	kotak	100	1 Paket	1 Paket	100%	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Rencana PO) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Dengan Tahun 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-1)			Target Program dan Kegiatan (Rencana Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
										Target Rencana Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Rencana Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana (%)	
						Jumlah makanan yang disediakan	730 Kotak	44,00	bekal/des	44,00	bekal/des	44,00/ bekal/des	100	730 Kotak	730 Kotak	100%
						Jumlah minuman yang disediakan	50 Botol/Dos							50 Botol/Dos	50 Botol/Dos	
						Jumlah air isi ulang yang disediakan	50 Galon	0	galon	0 galon	0 galon	0 galon		50 Galon	50 Galon	100%
2	16	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.925,00	lembar	2.925,00	lembar	2.925,00 lembar	100	1 Paket	1 Paket	100%
						Jumlah Barang yang digandakan	12500 Lembar	9.109,00	lembar	9.109,00	lembar	9.109,00 lembar	100	12500 Lembar	12500 Lembar	100%
								0	lembar	0 lembar	0 lembar	0 lembar				100%
2	16	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Baku dan Perawatan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Perawatan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12,00	surat kabar	12,00	surat kabar	12,00 surat kabar	100	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
2	16	01	2.06	09	Fasilitasi Kunjungan Turis	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Turis	1 Laporan	0	buku	0 buku	0 buku	0 buku		1 Laporan	1 Laporan	100%
						Jumlah Mainan Turis yang disediakan	30 Kotak							30 Kotak	30 Kotak	
2	16	01	2.06	10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90 Laporan	40,00	kali	40,00	kali	40,00 kali	100	90 Laporan	90 Laporan	100%
							495 Kotak	35,00	kali	35,00	kali	35,00 kali	100	495 Kotak	495 Kotak	100%
2	16	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan dalam setahun	100%		100	100		100	100			100
2	16	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Persewaan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Persewaan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit							1 Unit	1 Unit	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Rencana PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2021			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-1)			Target Program dan Kegiatan (Rencana Perangkat Daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
											Target Rencana Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Rencana Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana (%)	
2	16	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit						5 Unit	5 Unit	100%		
2	16	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan									100%		
2	16	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	2,00	unit	2,00	unit	2,00	unit	100	10 Unit	10 Unit	100%
					Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 Unit						8 Unit	8 Unit	100%		
2	16	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan									100%		
2	16	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									100%		
2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	100%		100	100		100	100			100	
2	16	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	50,00	surat	50,00	surat	50,00	surat	100	1 Laporan	1 Laporan	100%
2	16	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	24,00	rekoning	24,00	rekoning	24,00	rekoning	100	1 Laporan	1 Laporan	
						Jumlah Pemakaian Daya Listrik	0 Titik	72,00	rekoning	72,00	rekoning	72,00	rekoning	100	0 Titik	0 Titik	
						Jumlah Pemakaian daya Listrik	0 KWH	24,00	rekoning	24,00	rekoning	24,00	rekoning	100	0 KWH	0 KWH	100%
2	16	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	48 Laporan	192,00	buah	192,00	buah	192,00	buah	100	48 Laporan	48 Laporan	100%
								168,00	buah	168,00	buah	168,00	buah	100			
								24,00	kali	24,00	kali	24,00	kali	100			
								24,00	kali	24,00	kali	24,00	kali	100			100%

Kode					Urutan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Rencana PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-1)			Target Program dan Kegiatan (Rencana Peringkat Daerah Tahun 2023)	Pelembagaan Realisasi Capaian Target Rencana Peringkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
										Target Rencana Peringkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Rencana Peringkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana (%)
								0	kali	0 kali	0 kali				100%
2	16	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	84,00	kali	84,00 kali	84,00 kali	100	1 Laporan	1 Laporan	100%
								0	kali	0 kali	0 kali				100%
								0,00	buku	0,00 buku	0,00 buku	100			100%
2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemangku Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah pemangku urusan pemerintahan daerah yang terpelihara dalam setahun	100%	860,00	buah	860,00 buah	860,00 buah	100,00			100%
2	16	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	2,00	kali	2,00 kali	2,00 kali	100	1 Unit	1 Unit	
								1,00	unit	1,00 unit	1,00 unit	100			
2	16	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan	4 Unit	4,00	kali	4,00 kali	4,00 kali	100	4 Unit	4 Unit	100%
						Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	16 Kali	4,00	unit	4,00 unit	4,00 unit	100	16 Kali	16 Kali	100%
2	16	01	2.09	06	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara									
2	16	01	2.09	09	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	36 Unit	71,00	kali	71,00 kali	71,00 kali	100	36 Unit	36 Unit	100%
2	16	01	2.09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	35,00	m2	35,00 m2	35,00 m2	100	1 Unit	1 Unit	100%
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0	m2	0 m2	0 m2				100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Rencana FY) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Dengan Tahun 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-1)			Target Program dan Kegiatan (Menja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
										Target Rencana Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Rencana Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana (%)	
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi									100%	
2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah, counter narasi negatif, hoax, dan informasi misleading terhadap pemerintah daerah yang didinamisasikan sesuai dengan strategi komunikasi	75 %						75 %	75 %		
2	16	02	2.10		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	80%					100	80%	80%		
						Persentase (%) Informasi Publik yang disediakan dan diumumkan oleh Provinsi dan kab/kota sesuai amanat UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	77%					100	77%	77%		
						Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Tingkat Kecamatan	85%					100	85%	85%		
2	16	02	2.01	02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah dokumen hasil monitoring opini dan aspirasi publik	1 dokumen	80,00	aduan	80,00	aduan	80,00	aduan	100	1 dokumen	1 dokumen
						Jumlah fasilitasi Pengembangan SDM bagi admin SP4N-Lapor	1 kali	180,00	orang	180,00	orang	180,00	orang	100	1 kali	1 kali
						Jumlah laporan hasil koordinasi pengaduan / aspirasi publik	1 Laporan	4,00	kali	4,00	kali	4,00	kali	100	1 Laporan	1 Laporan
						Jumlah money admin SP4N-Lapor	2 Kali	4,00	laporan	4,00	laporan	4,00	laporan	100	2 Kali	2 Kali
						Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti	55 aduan						55 aduan	55 aduan		

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Rencana PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Dengan Tahun 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (a-1)				Target Program dan Kegiatan (Rencana Peringkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Peringkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
										Target Rencana Peringkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Rencana Peringkat Daerah Tahun 2022			Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023
						Jumlah peserta money walk SIMN-LAPOR	60 orang						60 orang	60 orang		
						Jumlah Peserta sosialisasi kanal SIMN-Lapor di tingkat Desa dan Kecamatan	100 orang						100 orang	100 orang		
2	16	02	2.10	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	1 Dokumen						1 Dokumen	1 Dokumen		
						Jumlah konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	10 konten						10 konten	10 konten		
						Jumlah peserta bimtek pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik	50 orang						50 orang	50 orang		
						Jumlah laporan hasil koordinasi pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik	4 laporan						4 laporan	4 laporan		
2	16	02	2.10	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1 Dokumen						1 Dokumen	1 Dokumen		
						Jumlah komunitas masyarakat / mitra strategis pemerintah daerah kabupaten/kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota	6 Komunitas	50,00	komunitas	50,00	komunitas	50,00	komunitas	100	6 Komunitas	
						Jumlah fasilitasi penyusunan media yang dilaksanakan	5 Kali	5,00	kali	5,00	kali	5,00	kali	100	5 Kali	
						Jumlah media komunikasi publik yang dikelola	10 Media	55,00	media	55,00	media	55,00	media	100	10 Media	
						Jumlah peralatan studio yang disediakan	4 Unit	4,00	unit	4,00	unit	4,00	unit	100	4 Unit	
						Jumlah laporan hasil koordinasi pengelolaan media komunikasi publik	4 Laporan	4,00	laporan	4,00	laporan	4,00	laporan	100	4 Laporan	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Rencana PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Dengan Tahun 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-1)			Target Program dan Kegiatan (Rencana Perangkat Daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
										Target Rencana Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Rencana Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana (%)	
2	16	02	2.10	06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	1 dokumen					100	1 dokumen	1 dokumen		
					Jumlah diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	4 diseminasi	0	diseminasi	0	diseminasi	0	diseminasi	100	4 diseminasi	4 diseminasi	
					Jumlah Daftar Informasi Publik OPD yang disosialisasikan	4 daftar	4,00	daftar	4,00	daftar	4,00	daftar	100	4 daftar	4 daftar	
					Jumlah Daftar Informasi Publik yang tersusun	4 daftar	4,00	daftar	4,00	daftar	4,00	daftar	100	4 daftar	4 daftar	
					Jumlah Daftar Informasi Publik yang terdapat di halaman website PPD OPD	4 daftar	4,00	daftar	4,00	daftar	4,00	daftar	100	4 daftar	4 daftar	
					Jumlah peserta Bastele untuk pengujian PPD di OPD, Kecamatan dan Desa	150 orang	150,00	orang	150,00	orang	150,00	orang	100	150 orang	150 orang	
					Jumlah layanan informasi terkait NTPD yang ditindaklanjuti	100%	4,00	%	4,00	%	4,00	%	100	100%	100%	
					Jumlah laporan hasil koordinasi pelayanan informasi publik	12 laporan	12,00	laporan	12,00	laporan	12,00	laporan	100	12 laporan	12 laporan	
					Jumlah pengaduan daerah yang ditindaklanjuti	10 aduan							10 aduan	10 aduan		
					Jumlah sarana prasarana/peralatan pendukung Call Center 112	10 unit							10 unit	10 unit		
2	16	02	2.10	07	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	10 layanan						10 layanan	10 layanan		
					Jumlah laporan hasil koordinasi pengelolaan layanan hubungan media	10 laporan							10 laporan	10 laporan		
					Jumlah produk penyusunan informasi bakelahan	38 produk							38 produk	38 produk		
2	16	02	2.10	08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	1 dokumen						1 dokumen	1 dokumen		

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Dengan Tahun 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (s-1)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
						Jumlah kegiatan fasilitasi bagi mitra strategis pendiri (media komunitas seperti KIM, dll) termasuk media lokal yang melaksanakan sosialisasi informasi kebijakan dan program prioritas nasional dan prioritas daerah	4 kegiatan	0	kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	100	4 kegiatan	4 kegiatan		
						Jumlah peserta bimbingan pembudayaan Sumber Daya Kelompok Informasi Masyarakat	150 orang	150,00	orang	150,00	orang	150,00	orang	100	150 orang	150 orang
						Jumlah koordinasi terkait dengan Kemutihan dengan Pemangku Kepentingan	12 laporan	12,00	laporan	12,00	laporan	12,00	laporan	100	12 laporan	12 laporan
2	16	02	2.10	09	Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis	1 dokumen						1 dokumen	1 dokumen		
						Jumlah peserta bimbingan penguatan pengelolaan/penguatan komunikasi krisis	120 orang						120 orang	120 orang		
						Jumlah media komunikasi yang digunakan sebagai sarana pengelolaan komunikasi krisis	4 media komunikasi						4 media komunikasi	4 media komunikasi		
						Jumlah Monev dan laporan terkait pengelolaan komunikasi krisis	4 laporan						4 laporan	4 laporan		
2	16	02	2.10	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang meningkat Kapasitasnya	100 orang	20,00	iklan	20,00	iklan	20,00	iklan	100	100 orang	100 orang
						Jumlah publikasi melalui iklan layanan masyarakat	25 iklan	100	orang	100	orang	100	orang	100	25 iklan	25 iklan
						Jumlah peserta bimbingan penguatan sumber daya komunikasi publik	100 orang	8,00	unit	8,00	unit	8,00	unit	100	100 orang	100 orang
						Jumlah sarana dan prasarana publikasi yang disediakan	10 unit	4,00	laporan	4,00	laporan	4,00	laporan	100	10 unit	10 unit
						Jumlah laporan hasil koordinasi penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik	4 laporan						4 laporan	4 laporan		

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Rencana FGD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Dengan Tahun 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (s-1)				Target Program dan Kegiatan (Rencana Peringkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Peringkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
										Target Rencana Peringkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Rencana Peringkat Daerah Tahun 2022			Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana (%)
2	16	02	2.10	11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	1 dokumen						1 dokumen	1 dokumen			
						Jumlah Monev dan laporan terkait Penguatan Komunikasi Informasi di Daerah	4 laporan						4 laporan	4 laporan			
						Jumlah peserta biastek, sosialisasi, FGD terkait Penguatan Tata Kelola	50 orang						50 orang	50 orang			
						Jumlah sarana prasarana alat kelengkapan maupun pendukung terkait Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	0 unit						0 unit	0 unit			
2	16	02	2.10	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	3 dokumen	5,00	media	5,00	media	5,00	media	100	3 dokumen	3 dokumen	
						Jumlah publikasi penyelenggaraan pemerintah daerah melalui media elektronik	5 media	50,00	media	50,00	media	50,00	media	100	5 media	5 media	
						Jumlah publikasi penyelenggaraan pemerintah daerah melalui media cetak	50 media	50,00	media	50,00	media	50,00	media	100	50 media	50 media	
						Jumlah media yang difasilitasi pemerintah daerah	38 media	100	orang	100	orang	100	orang	100	38 media	38 media	
						Jumlah peserta Biastek jurnalistik	100 orang	3,00	unit	3,00	unit	3,00	unit	100	100 orang	100 orang	
						Jumlah sarana dan prasarana jurnalistik yang disediakan	3 unit	50,00	laporan	50,00	laporan	50,00	laporan	100	3 unit	3 unit	
						Jumlah laporan hasil koordinasi penyelenggaraan humas dan media	50 laporan							50 laporan	50 laporan		
2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Layanan E-Government Yang Terintegrasi	80 %							80 %	80 %		

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Rencana PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Dengan Tahun 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-1)			Target Program dan Kegiatan (Rencana Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
										Target Rencana Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Rencana Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana (%)
2	16	03	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	85%	85%		85%	85%	100	85%	85%	
						Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	85%	85%		85%	85%	100	85%	85%	
2	16	03	2.01	01	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil koordinasi pendaftaran nama domain pemerintah daerah	3 dokumen	0	situs	0 situs	0 situs		3 dokumen	3 dokumen	
						Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota		3,00	laporan	0,00 laporan	3,00 laporan	100			
2	16	03	2.01	02	Penetradaksanan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetradaksanan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3 dokumen						3 dokumen	3 dokumen	
						Jumlah kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015	45	0	kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan		45	45	
						Jumlah laporan hasil koordinasi penetradaksanan nama domain pemerintah daerah	4 laporan	4,00	laporan	4,00 laporan	4,00 laporan	100	4 laporan	4 laporan	
2	16	03	2.01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intern Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intern Pemerintah Daerah	27 unit						27 unit	27 unit	
						Jumlah perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intern Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	46 OPD	0	OPD	0 OPD	0 OPD		46 OPD	46 OPD	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Rencana PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-1)			Target Program dan Kegiatan (Rencana Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
										Target Rencana Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Rencana Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana (%)
						Jumlah PD yang memiliki akses internet dan terhubung dengan jaringan intra pemerintah	46 OPD	0	OPD	0 OPD	0 OPD		46 OPD	46 OPD	
						Besarnya bandwidth yang disediakan	2 giga	600	giga	600 giga	600 giga	100	2 giga	2 giga	
						Jumlah pemeliharaan infrastruktur TIK	53 kali	53,00	kali	53,00 kali	53,00 kali	100	53 kali	53 kali	
						Jumlah laporan hasil koordinasi infrastruktur TIK	10 laporan	10,00	laporan	10,00 laporan	10,00 laporan	100	10 laporan	10 laporan	
2	16	03	2.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	85%	85%		85%	85%		85%	85%	
						Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	85%	85%		85%	85%		85%	85%	
						Persentase (%) Perangkat Daerah yang mengimplementasi/replikasi	85%	85%		85%	85%		85%	85%	
2	16	03	2.02	01	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		5,00	peraturan	5,00	peraturan	5,00	peraturan	100	
						Nilai indeks domain kebijakan dan tata kelola SPBE		0	indeks	0 indeks	0 indeks				
						Jumlah laporan hasil koordinasi penatalaksanaan e-government		4,00	laporan	4,00 laporan	4,00 laporan	100			
2	16	03	2.02	02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	2 dokumen						2 dokumen	2 dokumen	
						Jumlah aspek dalam arsitektur SPBE Oemkoh Ngsa yang didukung anggaran bidang TIK	14 aspek	0	aspek	0 aspek	0 aspek		14 aspek	14 aspek	

Kode	Urutan/Batang Urutan, Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Menstras PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-1)			Target Program dan Kegiatan (Rencana Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Menstras Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
										Target Rencana Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Rencana Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Menstras (%)
						Jumlah laporan hasil koordinasi rencana induk dan anggaran SPPE	6 laporan	6,00	laporan	6,00	laporan	100	6 laporan	6 laporan	
2	16	03	2.02	03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1 Unit						1 Unit	1 Unit	
						Jumlah perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	7 OPD	0	OPD	0	OPD		7 OPD	7 OPD	
						Jumlah perangkat daerah pemilik layanan yang memanfaatkan pusat data	7 OPD	20,00	OPD	20,00	OPD	100	7 OPD	7 OPD	
						Jumlah laporan hasil koordinasi pengelolaan pusat data	5 laporan	5,00	laporan	5,00	laporan	100	5 laporan	5 laporan	
						Jumlah sarana dan prasarana data center yang diadakan	3 unit	1,00	unit	1,00	unit	100	3 unit	3 unit	
2	16	03	2.02	04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintahan Daerah	22 jenis data						22 jenis data	22 jenis data	
						Jumlah Fasilitas sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo berbasis video, teks, data dan sinyal bunyi dengan memanfaatkan	4 sistem elektronik						4 sistem elektronik	4 sistem elektronik	
						Jumlah laporan hasil koordinasi penyelenggaraan komunikasi intra pemerintahan daerah	4 laporan						4 laporan	4 laporan	
2	16	03	2.02	06	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	22 Unit						22 Unit	22 Unit	
2	16	03	2.02	07	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang Menempatkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	46 OPD						46 OPD	46 OPD	
						Jumlah data yang dapat berbagi pakai	22 jenis data	0	jenis data	0	jenis data	0	22 jenis data	22 jenis data	

Kode	Uraian/Bidang Uraian Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Sistem PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kebijakan Kegiatan s/d Dengan Tahun 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-1)			Target Program dan Kegiatan (Rencana Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
						Target Rencana Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Rencana Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana (%)
						4,00	sistem elektronik	100	4 sistem elektronik	4 sistem elektronik	
						4,00	laporan	100	4 laporan	4 laporan	
2	16	03	2.02	08	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	22 Unit			22 Unit	22 Unit	
						13 OPD	0	OPD	13 OPD	13 OPD	
						22 sistem	0	sistem	22 sistem	22 sistem	
						4 laporan	3,00	laporan	4 laporan	4 laporan	
2	16	03	2.02	09	Penyediaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	9 layanan			9 layanan	9 layanan	
						4 aplikasi	0	aplikasi	4 aplikasi	4 aplikasi	
						9 layanan	0	layanan	9 layanan	9 layanan	
						14 layanan	0	layanan	14 layanan	14 layanan	
						3 laporan	3,00	laporan	3 laporan	3 laporan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PU) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Dengan Tahun 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-1)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Disimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	1 dokumen						1 dokumen	1 dokumen	
		Jumlah capaian pilot Smart City yang dikelola dan dikembangkan	2 capaian	0	capaian	0 capaian	0 capaian		2 capaian	2 capaian	
		Jumlah laporan hasil koordinasi pengembangan dan pengelolaan ekosistem Kabupaten / Kota Cerdas	6 laporan	6,00	laporan	6,00	6,00	100	6 laporan	6 laporan	
	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1 dokumen						1 dokumen	1 dokumen	
		Jumlah ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bidang pengelolaan Dinas Kominfo	15 orang	0	orang	0 orang	0 orang		15 orang	15 orang	
		Jumlah ASN yang mengikuti kegiatan literasi digital atau program pelatihan bidang digital yang difasilitasi oleh pemerintah daerah	200 orang	100	orang	100 orang	100 orang	100	200 orang	200 orang	
		Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan literasi digital atau program pelatihan bidang digital yang difasilitasi oleh pemerintah daerah	200 orang	100	orang	100 orang	100 orang	100	200 orang	200 orang	
		Jumlah laporan hasil koordinasi pengembangan dan pengelolaan sumber daya TIK pemerintah daerah	3 laporan	3,00	laporan	3,00	3,00	100	3 laporan	3 laporan	
	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	1 dokumen						1 dokumen	1 dokumen	
		Jumlah koordinasi kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan TIK yang ditindaklanjuti	4 kali	4,00	kali	4,00	4,00	100	4 kali	4 kali	

[illegible]

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Dengan Tahun 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-1)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
2	20	02	2.01	04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	46 Orang						46 Orang	46 Orang		
						Jumlah laporan hasil koordinasi peningkatan kapasitas kelembagaan	9 Laporan						9 Laporan	9 Laporan		
2	20	02	2.01	05	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Statistik	3 Unit						3 Unit	3 Unit		
						Jumlah laporan hasil koordinasi pengembangan infrastruktur	1 Laporan						1 Laporan	1 Laporan		
2	20	02	2.01	06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	2 Dokumen	0	kompilasi	0	kompilasi	0	kompilasi	2 Dokumen	2 Dokumen	
						Jumlah Laporan hasil koordinasi penyelenggaraan otorisasi statistik sektoral	1 Laporan	0	survey	0	survey	0	survey	1 Laporan	1 Laporan	
						Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun		0	kajian	0	kajian	0	kajian			
						Jumlah Laporan hasil koordinasi penyelenggaraan otorisasi statistik sektoral		1,00	laporan	1,00	laporan	1,00	laporan	100		
					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERMANDIAN											
2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Perangkat Daerah Yang Telah Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi Perangkat Daerah	80 %	80 %		80 %		80 %	100	80 %	80 %	
2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang diselenggarakan pengamanan sesuai standar		80 %		80 %		80 %	100			
2	21	02	2.01	01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Komunikasi Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Komunikasi Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan	1 Dokumen						1 Dokumen	1 Dokumen		

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Rencana PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Dengan Tahun 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-1)						Target Program dan Kegiatan (Rencana Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
											Target Rencana Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Rencana Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023		Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana (%)	
						Jumlah laporan hasil koordinasi Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah	2 laporan							2 laporan	2 laporan				
2	21	02	2.01	06	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	20,00	kegiatan	20,00	kegiatan	20,00	kegiatan	100	1 Laporan	1 Laporan			
						Jumlah peserta sosialisasi tentang jwcteksi keamanan informasi pemerintah daerah	100 orang	0	system elektronik	0	system elektronik	0	system elektronik	100	100 orang	100 orang			
						Jumlah peningkatan kompetensi SDM pengelola keamanan siber untuk K/L/D	3 orang	0	sistem elektronik	0	sistem elektronik	0	sistem elektronik	100	3 orang	3 orang			
						Jumlah perangkat keamanan TIK khusus berupa peralatan sandi untuk Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4 unit	4,00	laporan	4,00	laporan	4,00	laporan	100	4 unit	4 unit			
2	21	02	2.01		Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 laporan							1 laporan	1 laporan				
						Jumlah system elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian	1 Laporan							1 Laporan	1 Laporan				
						Jumlah Assessment Layanan Keamanan Informasi untuk Perangkat Daerah	2 layanan							2 layanan	2 layanan				
2	21	02	2.01		Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	6 OPD							6 OPD	6 OPD				

Kode					Uraian/Bidang Uraian Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-1)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
						Jumlah layanan keamanan informasi pemerintah daerah	2 layanan					2 layanan	2 layanan		
						Jumlah CSIRT yang dibentuk di sektor Pemerintah Daerah	1 CSIRT					1 CSIRT	1 CSIRT		
						Jumlah laporan hasil koordinasi penyelenggaraan layanan keamanan informasi pemerintah daerah	4 laporan					4 laporan	4 laporan		
2	21	02	2.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sindi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang dilakukan pengamatan persandian berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sindi (PHKS) yang ditetapkan									
2	21	02	2.02	01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sindi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sindi	6 OPD	1,00	CSIRT	1 CSIRT	1 CSIRT	100	6 OPD	6 OPD	
						Jumlah Layanan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sindi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 layanan	4,00	laporan	4 laporan	4 laporan	100	1 layanan	1 layanan	
						Jumlah perangkat komunikasi TIK dan infrastruktur komunikasi untuk Jaring Komunikasi Sindi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	8 unit						8 unit	8 unit	
						Pemeliharaan dan perbaikan peralatan sindi	8 unit						8 unit	8 unit	
						Jumlah laporan hasil koordinasi Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sindi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4 laporan						4 laporan	4 laporan	

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dalam memberikan pelayanan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya, yang telah dilakukan sebagaimana termuat dalam BAB I Pendahuluan.

Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi meliputi ;

- a. PENERAPAN TATA KELOLA TIK, dalam hal ini Pemeringkatan e-Gov Tata Kelola TIK diatur dalam Peraturan Bupati Ngawi Nomor 11.a tahun 2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi. Sedangkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik diatur dalam Peraturan Bupati Ngawi Nomor 1.a tentang SPBE dan Surat Edaran Sekretariat Daerah Nomor 480/790/404.114/2019 tentang Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi. Peraturan Bupati Ngawi dan Surat Edaran Sekretariat Daerah ini menjadi acuan perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi dalam pembangunan dan pengembangan TIK.
- b. INFRASTRUKTUR JARINGAN TIK, merupakan layanan fasilitasi keterhubungan antar SKPD untuk mengintegrasikan, sistem informasi, pertukaran data dan informasi dalam rangka mengimplementasikan e-government dan layanan publik;
- c. PEMBERDAYAAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM) merupakan upaya untuk memberdayakan lembaga komunikasi sosial yang berbasis kelompok masyarakat dengan tugas untuk mengumpulkan, mengolah dan menyebarluaskan informasi khususnya yang berkenaan dengan potensi wilayah sekitarnya.
- d. MEDIA CETAK DAN ELEKTRONIK / ON-LINE merupakan fasilitas akses informasi berbasis TIK untuk mendekatkan pemerintah dengan masyarakat melalui publikasi penyelenggaraan pemerintah daerah baik melalui media cetak, situs www.kominfo-

ngawikab.go.id dan media sosial Facebook, Instagram, Radio Suara Ngawi;

- e. MAJALAH TRINIL DAN GALERI, merupakan sarana / media untuk penyebarluasan informasi kepada masyarakat.
- f. UBLIK (Umyek Bareng Lintas Komunitas), merupakan salah satu kegiatan yang berhubungan dengan komunikasi publik yang melibatkan Lintas Komunitas yang ada di Ngawi Program ini dinilai tepat sasaran dalam era keterbukaan informasi publik serta banyak memberikan manfaat bagi masyarakat luas.
- g. HELP DESK PPID DAN SENGKETA INFORMASI, merupakan jenis pelayanan informasi masyarakat yang berkaitan dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Para pemohon informasi akan dilayani oleh PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan (SOP). Layanan permohonan informasi akan dipenuhi sesuai dengan SOP dalam jangka waktu yang sudah ditentukan (7 hari kerja).
- h. HELP DESK SP4N LAPOR merupakan jenis pelayanan pengaduan opini dan aspirasi publik dari masyarakat dan akan diteruskan kepada pihak yang berwenang menangani untuk segera ditindaklanjuti.

Hasil kinerja Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kabupaten Ngawi pada kurun waktu kinerja 5 tahun dapat dikatakan baik. Sebagaimana upaya pemerintah Kabupaten Ngawi terkait dengan pengembangan *smart city* tentunya peningkatan dan pengembangan aplikasi sebagai sarana pelayanan publik menjadi salah satu faktor utama percepatan pengembangan Indeks SPBE sebagai pengukur kinerja urusan Komunikasi dan Informatika pemerintah Kabupaten Ngawi. Semangat percepatan *smart city* sebagai program unggulan untuk digitalisasi pelayanan publik juga bisa dilihat dengan tingginya capaian dari Cakupan

pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan. Faktor lain yang cukup mempengaruhi kinerja urusan komunikasi dan informatika Kabupaten Ngawi dalam upaya digitalisasi pelayanan yaitu capaian dari persentase organisasi Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas kominfo sebesar 100%. Selain pemantapan sistem pada internal pemerintahan, optimalisasi cakupan akses internet untuk masyarakat juga mengambil peran pada pengembangannya. Sekitar 80% cakupan layanan komunikasi tersedia untuk warga dengan proporsi rumah tangga yang memiliki akses internet sebesar 62,68% dari 78,90% proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi dan persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon pada capaian Tahun 2022 . Secara umum dapat ditarik kesimpulan bahwa Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Ngawi memang menunjukkan capaian kinerja dengan nilai yang cukup positif. Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah, hasil realisasi di tahun 2021 hingga 2022 menunjukkan angka 36% secara konsisten. Realiasi yang masih kurang dari 100% tersebut terjadi karena masih banyak sistem layanan publik dan layanan administrasi Kabupaten Ngawi yang belum terintegrasi. Oleh karenanya, pada pemerintah Kabupaten Ngawi mulai berupaya untuk membangun arsitektur sistem layanan publik dan administrasi terintegrasi di tahun 2023. Selain persentase layanan publik dan layanan integrasi yang teritegrasi, juga terdapat Persentase data yang dapat berbagi pakai dengan hasil realisasi di bawah 100% yaitu 58% di tahun 2021 hingga 2022. Hampir sama dengan kasus terkait ketersediaan sistem terintegrasi untuk pelayanan publik dan

administrasi, karena sistem data yang belum terintegrasi dengan baik sehingga ketersediaan data yang dapat berbagi pakai juga masih kurang, oleh karenanya hasil realisasinya belum bisa mencapai 100%. Pada akhirnya pembangunan arsitektur sistem layanan publik dan administrasi yang terintegrasi juga menjadi solusi untuk masalah ketersediaan data berbagi pakai. Adapun pencapaian dan rencana pencapaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dapat dilihat pada tabel 2.2 sebagaimana terlampir.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Kabupaten Ngawi

No	Indikator	SPM/Standart Nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah			85.75	86.20	86.50	86.70	87.00	87.00	86.50	86.70	
	Cakupan layanan telekomunikasi			80%	80%	80%	90%	80%	80%	80%	90%	
	Persentase sistem data statistik sektoral yang terintegrasi			60%	65%	70%	75%	60%	60%	70%	75%	
	Persentase penyelenggaraan persandian untuk keamanan informasi			60%	-	-	-	60%	-	-	-	
	Indeks KAMI			-	300	350	450	-	300	350	450	
			IKK OUTCOME									
			Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	80%	85%	90%	90%	80%	85%	90%	90%	
			Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	50%	60%	70%	70%	50%	60%	70%	70%	
			Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	75%	80%	85%	85%	75%	80%	85%	85%	
			Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
			Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
			Tingkat keamanan informasi pemerintah	60	60	60	60	60	60	60	60	
			IKK OUTPUT									
			Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	70%	80%	85%	85%	70%	80%	85%	85%	

No	Indikator	SPM/Standart Nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
			Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	90%	90%	100%	100%	90%	90%	100%	100%	
			Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	
			Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015	80%	80%	90%	90%	80%	80%	90%	90%	
			Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	80%	85%	90%	90%	80%	85%	90%	90%	
			Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan	80%	85%	90%	90%	80%	85%	90%	90%	
			Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	50%	60%	70%	70%	50%	60%	70%	70%	
			Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	80%	85%	90%	90%	80%	85%	90%	90%	
			Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	50%	60%	70%	70%	50%	60%	70%	70%	
			Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	50%	60%	70%	70%	50%	60%	70%	70%	
			Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	80%	85%	90%	90%	80%	85%	90%	90%	
			Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	80%	80%	90%	90%	80%	80%	90%	90%	

No	Indikator	SPM/Standart Nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
			Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	75%	80%	85%	85%	75%	80%	85%	85%	
			Persentase data yang dapat berbagi pakai	75%	80%	85%	85%	75%	80%	85%	85%	
			Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	80%	85%	90%	90%	80%	85%	90%	90%	
			Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	
			Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi egovernment	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	
			Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi	75%	80%	85%	85%	75%	80%	85%	85%	
			Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	
			Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	70%	80%	85%	85%	70%	80%	85%	85%	
			Tersedianya buku profil daerah	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	
			Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	3	3	3	3	3	3	3	3	
			Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	3	3	3	3	3	3	3	3	
			Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	3	3	3	3	3	3	3	3	
			Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dr BPS	3	3	3	3	3	3	3	3	
			Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral	60%	60%	70%	70%	60%	60%	70%	70%	
			Persentase kelengkapan metadata variabel sektoral	60%	60%	70%	70%	60%	60%	70%	70%	

No	Indikator	SPM/Standart Nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
			Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
			Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip - prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
			Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
			Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS) yang ditetapkan	80%	80%	90%	90%	80%	80%	90%	90%	

2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Tingkat capaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sudah dilaksanakan secara bertahap sesuai Tujuan dan Sasaran Renstra mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 yang menjadi prioritas utama adalah pembangunan infrastruktur terkait pembangunan jaringan Fiber Optik di 27 titik dan pembangunan Data Center dalam rangka menunjang kelancaran ketersediaan jaringan Informasi teknologi di Kabupaten Ngawi dalam rangka untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur TIK dan layanan publik. Sesuai kewenangannya maka untuk pengadaan Bandwidth untuk seluruh OPD, kecamatan, ruang publik dan pasar dalam rangka menunjang kelancaran dalam pelayanan publik maka pengadaan Bandwidth semua dicukupi oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian. Dalam pelayanan e – government sudah diterapkan sesuai manajemen SPBE secara efisien, efektif dan berkesinambungan dengan langkah mempercepat implementasi SPBE yang terintegrasi meliputi ; integrasi perencanaan, penganggaran, pengadaan, integrasi data kepegawaian, integrasi data kearsipan, integrasi pengaduan publik, pembangunan pusat data nasional untuk meningkatkan nilai SPBE agar menjadi lebih baik lagi, selain itu juga telah disusun Dashboard eksekutif dalam rangka persiapan penyusunan Data Statistik Sektoral Satu Data Indonesia, selain itu juga penerapan sistem elektronik berbasis android dalam pemerintahan dalam rangka pengelolaan layanan publik sesuai standart. Ditahun 2021 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian juga telah membangun Mini Command Center dan Call Center 112 dalam rangka pelayanan terkait pengaduan darurat

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, terdapat beberapa isu strategis, antara lain :

1. Belum optimalnya pelayanan publik pemerintah daerah ;

2. Keterbukaan Informasi Publik ;
3. Menciptakan masyarakat pedesaan yang sadar dan melek dunia digital serta mampu menangkal berita hoax ;
4. Sistem Pemerintahan berbasis elektronik ;
5. Pengembangan dan Integrasi Aplikasi ;
6. Smart City ;
7. Masyarakat Digital Industri 4.0 ;
8. Government Chief Information Officer (GCIO) ;
9. Satu Data Indonesia ;
10. Transformasi fungsi persandian dalam menjamin keamanan *e-government* atau sistem pemerintahan berbasis elektronik dan mendukung pembentukan ekosistem kota pintar (*smart city*).

Beberapa tantangan dan peluang yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan TIK yaitu :

Tantangan :

1. Globalisasi informasi yang berdampak pada keterbukaan informasi publik;
2. Pesatnya perkembangan TIK;
3. Ketersediaan Infrastruktur TIK yang belum merata;
4. Terbatasnya pemahaman aparaturnya dan masyarakat terhadap TIK;
5. Data yang tidak akurat dan terpercaya;
6. Kesenjangan informasi di masyarakat;

Peluang :

1. Kepedulian pimpinan terhadap bidang kominfo
2. Pengembangan dan Pemanfaatan Smart City oleh Perangkat Daerah
3. Kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik
4. Kebutuhan pengembangan SPBE
5. Tersedianya data sektoral

- 6.Tersedianya perundangan yang mendasari regulasi bidang Kominfo
- 7.Kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi.

Dampak terhadap visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional / internasional Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian melakukan pengelolaan opini dan aspirasi publik, pengelolaan informasi dan komunikasi publik, pengelolaan aplikasi generik dan spesifik, pengelolaan e - government , infrastruktur data center , pengelolaan manajemen data dan informasi e – government, data statistik sektoral, pengelolaan keamanan informasi e – government, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City dan penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Kabupaten Ngawi, sehingga diharapkan dengan totalitas dalam pencapaian pelayanan kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian mampu mendukung dalam pencapaian visi misi kepala daerah terpilih sesuai dengan tugas , fungsi dan kewenangan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

Visi : “Terwujudnya masyarakat Kabupaten Ngawi yang mandiri, berakhlak, makmur dan berdaya saing berbasis agropolitan dengan semangat gotong royong dalam bingkai NKRI”				
No	Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi 3 : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Memberikan Pelayanan Publik yang Prima			

	Program Prioritas : 1. Branding Negeri Ngawi Ramah 2. Smart Village			
	Program Informasi Komunikasi Publik	- Belum optimalnya pengelolaan dan layanan informasi publik - Belum adanya manajemen isu pemerintah sehingga program dan kebijakan pemerintah lebih banyak tersampaikan secara sporadis dan situasional alih-alih terencana dan terukur	Belum adanya strategi komunikasi pemerintah daerah yg merencanakan mulai dari penyusunan agenda, framing isu, pemilihan komunikator, alternatif channel (saluran media) dan monitoring media.	Tersusunnya agenda prioritas komunikasi pemerintah daerah Ada SOP yg jelas terkait pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik Ada evaluasi dan monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas Akan diaktifkan lagi NGOPI BARENG (Komunikasi publik dikolaborasikan dengan serap aspirasi) Bersama Bupati dan/atau Wakil Bupati sebagai wahana mengkomunikasikan kebijakan pemerintah sekaligus menyerap aspirasi masyarakat Fasilitasi Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) masing-masing OPD
	Program Aplikasi Informatika	- Rendahnya jumlah Perangkat Daerah yang terlayani infrastruktur TIK	- Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan Data Center	- Komitmen Kepala Daerah mendukung

		- Infrastruktur jaringan yang belum optimal - Penerapan SPBE bagi Layanan Internal Birokrasi dan Layanan Publik Tidak menjadi prioritas program kerja pembangunan sesuai visi misi pada Instansi Pusat/Pemerintah - Belum terintegrasinya data dan informasi OPD yang memenuhi standart Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) - Belum optimalnya Tata Kelola SPBE - Belum terwujudnya fungsi GCIO - Kurangnya Trust (kepercayaan) dari Perangkat Daerah terhadap pengembangan TIK	- Ketersediaan Infrastruktur TIK yang belum merata - Belum adanya mekanisme SOP Ruang Komando - Terbatasnya sumberdaya manusia TIK yang trampil dan professional - Minimnya tumbuhnya ekosistem Smart City - Minimnya Layanan Publik dan Pemerintah Berbasis Elektronik/Web - - Belum optimalnya pengembangan aplikasi TIK	- peningkatan TIK - Tersedianya perundangan yang mendasari regulasi bidang Kominfo - Pengembangan dan Pemanfaatan Smart City oleh Perangkat Daerah
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	- Data yang tidak akurat dan terpercaya karena tidak updating - Kualitas dan kuantitas data statistik yang belum sesuai dengan standar baku - Rendahnya kepercayaan pengguna data terhadap Data Statistik Sektoral - Ketersediaan infrastruktur yang mendukung kegiatan statistik sektoral di pemerintah kab/kota yang belum memadai -	- Belum optimalnya pengintegrasian sistem informasi dan data Perangkat Daerah - Masih rendahnya pengelolaan data administrasi - Ketersediaan kuantitas dan kualitas SDM statistik di pemerintah provinsi/kab/kota yang belum memadai	- Ketersediaan data statistik sektoral

Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Belum optimalnya evaluasi secara berkala aplikasi yang telah dibangun oleh perangkat daerah - Penataan dan kedudukan organisasi pelaksana urusan persandian belum dilakukan sesuai ketentuan - Kurangnya kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia di bidang keamanan informasi	- Aplikasi yang telah dibangun oleh Perangkat Daerah masih belum semua memenuhi standar keamanan sehingga memperbesar peluang terjadinya insiden keamanan informasi - Fungsi proteksi di bidang keamanan informasi belum terlaksana secara efektif dan efisien - Lemahnya kebijakan tata kelola dan manajemen keamanan informasi di lingkup Pemerintah Daerah	- Aplikasi yang akan dibangun oleh Perangkat Daerah harus didampingi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika agar aplikasi tersebut dapat memenuhi standar keamanan informasi - Hubungan kerjasama yang baik dengan instansi vertikal guna peningkatan keamanan informasi
--	---	---	--

Ada beberapa capaian kinerja yang kemudian masih perlu untuk ditingkatkan dan dioptimalkan dalam proses pencapaiannya diantaranya terkait dengan pengintegrasian aplikasi pada setiap dinas ataupun unit kerja di jajaran perangkat daerah Kabupaten Ngawi yang masih belum sepenuhnya tercapai. Selain itu optimalisasi pemanfaatannya dalam pemenuhan pelayanan publik juga perlu untuk ditingkatkan agar kemudian mampu memberikan nilai kepuasan kepada masyarakat secara maksimal. Pada akhirnya pembangunan arsitektur sistem layanan publik dan administrasi yang terintegrasi juga menjadi solusi untuk masalah ketersediaan data berbagi pakai.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD sudah tertuang dalam rancangan strategis lima tahunan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang merupakan perencanaan yang benar – benar dipersiapkan sesuai blue print tahapan Smart City, tahapan tahun ke – lima diharapkan pembangunan infrastruktur Fiber Optik dan Data Center sudah terlaksana sehingga bisa mendukung pembangunan Teknologi Informatika di Kabupaten Ngawi dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik yang prima. Review hasil analisis kebutuhan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dalam rangka meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi capaian selama 5 (lima) tahun terakhir serta mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah ,sehingga dirumuskan beberapa kegiatan prioritas yang harus segera diimplementasikan adalah sebagai berikut ;

1. Pembangunan 1 titik Fiber Optic di Kantor Damkar ;
2. Kecupukuan Bandwidth untuk kebutuhan seluruh OPD dan ruang publik ;
3. Smart City ;
4. Pengoptimalan pencapaian Indeks SPBE;
5. Pengembangan Dashboard Excecutive dan Portal Data ;
6. Pemberian pelayanan dan Informasi berbasis android ;
7. Pengadaan Bandwidth pasar untuk aplikasi e – retribusi ;
8. Peningkatan peran Bakohumas ;
9. Penyusunan regulasi Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
10. Bimtek pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik;
11. Peremajaan sarana dan prasarana studio Radio Suara Ngawi;
12. Peningkatan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat ;
13. Satu Data Indonesia ;
14. Transformasi fungsi persandian dalam menjamin keamanan *e-government* atau sistem pemerintahan berbasis elektronik dan mendukung pembentukan ekosistem kota pintar (*smart city*).

Analisis kebutuhan yang lebih penting untuk terlebih dulu dilaksanakan tanpa mengurangi substansi dan kualitas dari pelayanan yang seharusnya dilaksanakan, sehingga perlu dilaksanakan review terlebih dahulu terhadap rancangan awal RKPD dengan benar – benar

menganalisis substansi dari masing – masing program kegiatan dengan melihat dampaknya terhadap jalannya pemerintahan juga terhadap masyarakat. Setelah dilakukan review terhadap rancangan awal bisa disimpulkan ada beberapa program / kegiatan yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya sehingga harus diprioritaskan dan ada kegiatan yang masih bisa ditunda pelaksanaannya ditahun berikutnya.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD dapat dilihat pada tabel 2.4 sebagaimana terlampir.

Tabel 2.4
 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
 Kabupaten Ngawi

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Kode					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
							Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	86.50				Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	86.50		
							Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	86.50				Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	86.50		
2	16	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	100%	6,879,530,654.00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	100%	6,883,293,655.00	
2	16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja OPD yang disusun tepat waktu	100%	56,909,999.87	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja OPD yang disusun tepat waktu	100%	11,998,000.00	
2	16	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen	35,699,999.87	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen	1,720,000.00	
2	16	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1,215,000.00	
2	16	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1,215,000.00	
2	16	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2,240,000.00	
2	16	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	2,240,000.00	

Kode					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
2	16	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 laporan	21,210,000.00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 laporan	3,368,000.00	
2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase dokumen dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu	100%	5,649,182,718.63	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase dokumen dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu	100%	5,763,974,549.00	
2	16	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.430 Orang/bulan	5,623,730,718.63	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.430 Orang/bulan	5,756,214,549.00	
							Jumlah dokumen pengajuan gaji dan tunjangan ASN dan Non ASN yang disusun	26 dok				Jumlah dokumen pengajuan gaji dan tunjangan ASN dan Non ASN yang disusun	26 dok		
2	16	01	2.02	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	10,605,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	2,780,000.00	
2	16	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	50 laporan	14,847,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	50 laporan	4,980,000.00	
					Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Capaian realisasi retribusi daerah terhadap target tahun berkenaan	100%	15,150,000.00	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Capaian realisasi retribusi daerah terhadap target tahun berkenaan			
					Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian	Jumlah Laporan Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi daerah	12 dok	15,150,000.00	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian	Jumlah Laporan Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi daerah			
2	16	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase ASN yang terpenuhi administrasi kepegawaianya dalam setahun	100%	44,309,890.50	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase ASN yang terpenuhi administrasi kepegawaianya dalam setahun	100%	-	

Kode					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
2	16	01	2.05	0001	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	15,922,500.00	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	-	
2	16	01	2.05	0010	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 orang	28,387,390.50	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	57 orang	-	
2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum dalam setahun	100%	177,342,000.00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum dalam setahun	100%	158,996,726.00	
2	16	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	10,600,000.00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	3,144,000.00	
2	16	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	31,500,000.00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	54,183,440.00	
2	16	01	2.06	0003	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	21,200,000.00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	1,992,000.00	
							Jumlah minuman yang disediakan					Jumlah minuman yang disediakan			
							Jumlah air isi ulang yang disediakan					Jumlah air isi ulang yang disediakan			
2	16	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	10,605,000.00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	9,438,000.00	
							Jumlah barang yang digandakan	12000 lembar				Jumlah barang yang digandakan	12000 lembar		
2	16	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 dokumen	4,212,000.00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 dokumen	1,980,000.00	
2	16	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	3 laporan	-	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	3 laporan	1,300,000.00	

Kode					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
							Jumlah mamin Kunjungan Tamu yang disediakan	60 kotak				Jumlah mamin Kunjungan Tamu yang disediakan	60 kotak		
2	16	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90 laporan	99,225,000.00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90 laporan	86,959,286.00	
							Jumlah mamin Rapat SKPD yang disediakan	150 kotak				Jumlah mamin Rapat SKPD yang disediakan	150 kotak		
2	16	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan sesuai dengan kebutuhan dalam setahun	100%	324,829,124.00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan sesuai dengan kebutuhan dalam setahun	100%	472,468,000.00	
2	16	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Sunit	139,986,000.00	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 unit	472,468,000.00	
2	16	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 unit	-	
2	16	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 paket	44,000,220.00	Pengadaan Mebel	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 unit	-	
2	16	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 unit	80,320,024.00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 unit	-	
2	16	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2unit	21,935,380.00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2unit	-	
2	16	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	38,587,500.00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	-	

Kode					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	100%	433,469,921.00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	100%	388,276,380.00	
2	16	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	3,075,450.00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan		
2	16	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	280,826,490.00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	246,036,380.00	
							Jumlah penambahan daya listrik					Jumlah penambahan daya listrik	-		
							Jumlah pemasangan daya listrik					Jumlah pemasangan daya listrik	-		
							Jumlah iklan/publikasi media cetak dan elektronik	-				Jumlah iklan/publikasi media cetak dan elektronik	-		
2	16	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 laporan	68,230,000.00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 laporan	64,800,000.00	
2	16	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	81,317,981.00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	77,440,000.00	
2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara dalam setahun	100%	178,337,000.00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara dalam setahun	100%	87,580,000.00	
2	16	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 unit	31,815,000.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 unit	2,000,000.00	

Kode					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
2	16	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 unit	53,025,000.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 unit	16,500,000.00	
2	16	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 unit	51,497,000.00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	36 unit	-	
2	16	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	60 kali	42,000,000.00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	19,080,000.00	
2	16	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	-	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	-	-	
2	16	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	40,000,000.00	
2	16	01	2.09	0012	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	10,000,000.00	
							Indeks SPBE	-	-			Indeks SPBE	4	-	
							Cakupan layanan telekomunikasi	90.00%	8,872,741,526.00			Cakupan layanan telekomunikasi	90.00%	4,019,793,000.00	

Kode					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
2	16	02			PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		Persentase (%) konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah, counter narasi negatif, hoax, dan informasi misleading terhadap pemerintah daerah yang didiseminasikan sesuai dengan strategi komunikasi	75%	3,402,291,150.00	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		Persentase (%) konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah, counter narasi negatif, hoax, dan informasi misleading terhadap pemerintah daerah yang didiseminasikan sesuai dengan strategi komunikasi	75%	819,170,000.00	
2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Ngawi	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	85%	3,402,291,150.00	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Ngawi	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	85%	819,170,000.00	
							Persentase (%) Informasi Publik yang disediakan dan diumumkan oleh Provinsi dan kab/kota sesuai amanat UU No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik	79%				Persentase (%) Informasi Publik yang disediakan dan diumumkan oleh Provinsi dan kab/kota sesuai amanat UU No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik	79%		
							Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Tingkat Kecamatan	90%				Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Tingkat Kecamatan	90%		
2	16	02	2.01	0001	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Kab.Ngawi	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	1 dokumen	10,000,000.00	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Kab.Ngawi	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	1 dokumen		
2	16	02	2.01	0002	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Kab.Ngawi	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	1 dokumen	232,941,000.00	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Kab.Ngawi	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	1 dokumen	50,550,000.00	
							Jumlah fasilitasi Pengembangan SDM bagi admin SP4N-Lapor	4 kali				Jumlah fasilitasi Pengembangan SDM bagi admin SP4N-Lapor	4 kali		

Kode					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
							Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti	90 aduan				Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti	90 aduan		
							Jumlah peserta sosialisasi Kanal SP4N-LAPOR! Di tingkat desa dan Kecamatan	250 orang				Jumlah peserta sosialisasi Kanal SP4N-LAPOR! Di tingkat desa dan Kecamatan	250 orang		
							Jumlah peserta admin SP4N-LAPOR!	48 orang				Jumlah peserta admin SP4N-LAPOR!	48 orang		
							Jumlah laporan hasil koordinasi pengaduan / aspirasi publik	4 laporan				Jumlah laporan hasil koordinasi pengaduan / aspirasi publik	4 laporan		
2	16	02	2.01	0003	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Kab.Ngawi	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	1 dokumen	16,337,500.00	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Kab.Ngawi	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	1 dokumen		
							Jumlah agenda prioritas pemerintah daerah yang terpublikasi	70 agenda				Jumlah agenda prioritas pemerintah daerah yang terpublikasi	70 agenda		
							Jumlah laporan monitoring dan evaluasi yang ditindaklanjuti	4 laporan				Jumlah laporan monitoring dan evaluasi yang ditindaklanjuti	4 laporan		
2	16	02	2.01	0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Kab.Ngawi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	1 dokumen	71,662,500.00	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Kab.Ngawi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	1 dokumen	20,248,000.00	
							Jumlah konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	15 konten				Jumlah konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	15 konten		
							Jumlah peserta bimtek pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik	50 orang				Jumlah peserta bimtek pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik	50 orang		

Kode					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
							Jumlah laporan hasil koordinasi pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik	4 laporan				Jumlah laporan hasil koordinasi pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik	4 laporan		
2	16	02	2.01	0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kab.Ngawi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1 dokumen	510,744,150.00	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kab.Ngawi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1 dokumen	82,730,000.00	
							Jumlah komunitas masyarakat / mitra strategis pemerintah daerah kabupaten/kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota	6 komunitas				Jumlah komunitas masyarakat / mitra strategis pemerintah daerah kabupaten/kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota	6 komunitas		
							Jumlah fasilitasi penyiaran media yang dilaksanakan	5 kali				Jumlah fasilitasi penyiaran media yang dilaksanakan	5 kali		
							Jumlah media komunikasi publik yang dikelola	10 media				Jumlah media komunikasi publik yang dikelola	10 media		
							Jumlah peralatan studio yang diadakan	4 unit				Jumlah peralatan studio yang diadakan	4 unit		
							Jumlah laporan hasil koordinasi pengelolaan media komunikasi publik	4 laporan				Jumlah laporan hasil koordinasi pengelolaan media komunikasi publik	4 laporan		
2	16	02	2.01	0006	Pelayanan Informasi Publik	Kab.Ngawi	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	1 dokumen	240,000,000.00	Pelayanan Informasi Publik	Kab.Ngawi	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	1 dokumen	50,850,000.00	
							Jumlah diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	4diseminasi				Jumlah diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	4diseminasi		

Kode					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
							Jumlah Daftar Informasi Publik OPD yang dimutakhirkan	4 daftar				Jumlah Daftar Informasi Publik OPD yang dimutakhirkan	4 daftar		
							Jumlah Daftar Informasi Publik yang disosialisasikan	4 daftar				Jumlah Daftar Informasi Publik yang disosialisasikan	4 daftar		
							Jumlah Daftar Informasi Publik yang tersaji di halaman website PPID OPD	4 daftar				Jumlah Daftar Informasi Publik yang tersaji di halaman website PPID OPD	4 daftar		
							Jumlah peserta Bimtek untuk penguatan PPID di OPD, Kecamatan dan Desa	150 orang				Jumlah peserta Bimtek untuk penguatan PPID di OPD, Kecamatan dan Desa	150 orang		
							Jumlah layanan informasi terkait NTPD yang ditindaklanjuti	100%				Jumlah layanan informasi terkait NTPD yang ditindaklanjuti	100%		
							Jumlah laporan hasil koordinasi pelayanan informasi publik	12 laporan				Jumlah laporan hasil koordinasi pelayanan informasi publik	12 laporan		
2	16	02	2.01	0007	Layanan Hubungan Media	Kab.Ngawi	Jumlah Layanan Hubungan Media	1 dokumen	110,250,000.00	Layanan Hubungan Media	Kab.Ngawi	Jumlah Layanan Hubungan Media	10 layanan	75,000,000.00	
							Jumlah laporan hasil koordinasi pengelolaan layanan hubungan media	10 laporan				Jumlah laporan hasil koordinasi pengelolaan layanan hubungan media	10 laporan		
2	16	02	2.01	0008	Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan	Kab.Ngawi	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	1 dokumen	137,812,500.00	Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan	Kab.Ngawi	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	1 dokumen	71,889,000.00	
							Jumlah kegiatan fasilitasi bagi mitra strategis penda (media komunitas seperti KIM, dll) termasuk media lokal yang melaksanakan diseminasi informasi kebijakan dan program prioritas nasional dan prioritas daerah	6 kegiatan				Jumlah kegiatan fasilitasi bagi mitra strategis penda (media komunitas seperti KIM, dll) termasuk media lokal yang melaksanakan diseminasi informasi kebijakan dan program prioritas nasional dan prioritas daerah	6 kegiatan		
							Jumlah peserta bimtek pemberdayaan Sumber Daya Kelompok Informasi Masyarakat	150 orang				Jumlah peserta bimtek pemberdayaan Sumber Daya Kelompok Informasi Masyarakat	150 orang		

Kode					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
							Jumlah laporan hasil koordinasi pengelolaan informasi publik	12 laporan				Jumlah laporan hasil koordinasi pengelolaan informasi publik	12 laporan		
2	16	02	2.01	0009	Manajemen Komunikasi Krisis	Kab.Ngawi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis	1 dokumen	100,000,000.00	Manajemen Komunikasi Krisis	Kab.Ngawi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis	1 dokumen	12,518,000.00	

Kode					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
							Jumlah peserta bintek penguatan pengelolaan/penanganan komunikasi krisis	120 orang				Jumlah peserta bintek penguatan pengelolaan/penanganan komunikasi krisis	120 orang		
							Jumlah media komunikasi yang digunakan sebagai sarana pengelolaan komunikasi krisis	4 media komunikasi				Jumlah media komunikasi yang digunakan sebagai sarana pengelolaan komunikasi krisis	4 media komunikasi		
							Jumlah Monev dan laporan terkait pengelolaan komunikasi krisis	4 laporan				Jumlah Monev dan laporan terkait pengelolaan komunikasi krisis	4 laporan		
2	16	02	2.01	0010	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Kab.Ngawi	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang meningkat Kapasitasnya	1 dokumen	654,044,000.00	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Kab.Ngawi	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang meningkat Kapasitasnya	5 orang	169,336,000.00	
							Jumlah publikasi melalui iklan layanan masyarakat	30 iklan				Jumlah publikasi melalui iklan layanan masyarakat	30 iklan		
							Jumlah peserta bintek penguatan sumber daya komunikasi publik	100 orang				Jumlah peserta bintek penguatan sumber daya komunikasi publik	100 orang		
							Jumlah sarana dan prasarana publikasi yang diadakan	12 unit				Jumlah sarana dan prasarana publikasi yang diadakan	12 unit		
							Jumlah laporan hasil koordinasi penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik	4 laporan				Jumlah laporan hasil koordinasi penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik	4 laporan		
2	16	02	2.01	0011	Penguatan tata kelola Komisi Informasi Daerah	Kab.Ngawi	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	1 dokumen	45,875,000.00	Penguatan tata kelola Komisi Informasi Daerah	Kab.Ngawi	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	1 dokumen	8,600,000.00	
							Jumlah Monev dan laporan terkait Penguatan Komunikasi Informasi di Daerah					Jumlah Monev dan laporan terkait Penguatan Komunikasi Informasi di Daerah	4 laporan		
							Jumlah peserta bintek, sosialisasi, PGD terkait Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	50 orang				Jumlah peserta bintek, sosialisasi, PGD terkait Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	50 orang		

Kode					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
							Jumlah sarana prasarana alat kelengkapan maupun pendukung terkait Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	4 unit				Jumlah sarana prasarana alat kelengkapan maupun pendukung terkait Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	4 unit		
2	16	02	2.01	0012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Kab.Ngawi	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	1 dokumen	1,272,424,300.00	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Kab.Ngawi	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	1 dokumen	277,449,000.00	
							Jumlah publikasi penyelenggaraan pemerintah daerah melalui media elektronik	5 media				Jumlah publikasi penyelenggaraan pemerintah daerah melalui media elektronik	5 media		
							Jumlah publikasi penyelenggaraan pemerintah daerah melalui media cetak	50 media				Jumlah publikasi penyelenggaraan pemerintah daerah melalui media cetak	50 media		
							Jumlah media yang difasilitasi pemerintah daerah	38 media				Jumlah media yang difasilitasi pemerintah daerah	38 media		
							Jumlah peserta Bintek jurnalistik	100 orang				Jumlah peserta Bintek jurnalistik	100 orang		
							Jumlah sarana dan prasarana jurnalistik yang diadakan	3 unit				Jumlah sarana dan prasarana jurnalistik yang diadakan	3 unit		
							Jumlah laporan hasil koordinasi penyelenggaraan humas dan media	50 laporan				Jumlah laporan hasil koordinasi penyelenggaraan humas dan media	50 laporan		
2	16	02	2.01	0013	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Ngawi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5 unit		Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Ngawi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5 unit		
2	16	03			PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA		Persentase layanan e-government yang terintegrasi	85%	5,470,450,376.00	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA		Persentase layanan e-government yang terintegrasi	85%	3,200,623,000.00	

Kode					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
2	16	03	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	90%	2,643,074,376.00	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	90%	1,691,051,500.00	
							Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	90%				Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	90%		
2	16	03	2.01	0001	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten / Kota	Kab.Ngawi	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	200 situs	165,375,000.00	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten / Kota	Kab.Ngawi	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	259 Domain	91,000,000.00	
							Jumlah laporan hasil koordinasi pendaftaran nama domain pemerintah daerah	4 laporan				Jumlah laporan hasil koordinasi pendaftaran nama domain pemerintah daerah	4 laporan		
2	16	03	2.01	0002	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Kab.Ngawi	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3 dokumen	165,375,000.00	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Kab.Ngawi	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3 dokumen	33,451,500.00	
							Jumlah kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015	95				Jumlah kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015	95		
							Jumlah laporan hasil koordinasi penatalaksanaan nama domain pemerintah daerah	4 laporan				Jumlah laporan hasil koordinasi penatalaksanaan nama domain pemerintah daerah	4 laporan		
2	16	03	2.01	0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kab.Ngawi	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	27 unit	2,312,324,376.00	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kab.Ngawi	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	27 unit	1,566,600,000.00	

Kode					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
							Jumlah perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	46 OPD				Jumlah perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	46 OPD		
							Jumlah PD yang memiliki akses internet dan terhubung dengan jaringan intra pemerintah	46 OPD				Jumlah PD yang memiliki akses internet dan terhubung dengan jaringan intra pemerintah	46 OPD		
							Besaran bandwidth yang disediakan	2,5 giga				Besaran bandwidth yang disediakan	2,5 giga		
							Jumlah pemeliharaan infrastruktur TIK	53 kali				Jumlah pemeliharaan infrastruktur TIK	53 kali		
							Jumlah laporan hasil koordinasi infrastruktur TIK	10 laporan				Jumlah laporan hasil koordinasi infrastruktur TIK	10 laporan		
2	16	03	2.02		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	90%	2,827,376,000.00	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	90%	1,509,571,500.00	
							Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	90%				Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	90%		
							Persentase (%) Perangkat Daerah yang mengimplementasi/replikasi inovasi yang mendukung smart city sesuai dengan Masterplan	90%				Persentase (%) Perangkat Daerah yang mengimplementasi/replikasi inovasi yang mendukung smart city sesuai dengan Masterplan	90%		
2	16	03	2.02	0001	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Kab.Ngawi	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E - Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2 dokumen	220,500,000.00	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Kab.Ngawi	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E - Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2 dokumen	154,215,000.00	

Kode						Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
								Nilai indeks domain kebijakan dan tata kelola SPBE	3.3				Nilai indeks domain kebijakan dan tata kelola SPBE	3.3		
								Jumlah laporan hasil koordinasi penatalaksanaan e - government	6 laporan				Jumlah laporan hasil koordinasi penatalaksanaan e - government	6 laporan		
2	16	03	2.02	0002	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kab.Ngawi	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	1 dokumen		330,750,000.00	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kab.Ngawi	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	1 dokumen	175,000,000.00	
							Jumlah aspek dalam arsitektur SPBE Pemkab Ngawi yang didukung anggaran bidang TIK	14 aspek					Jumlah aspek dalam arsitektur SPBE Pemkab Ngawi yang didukung anggaran bidang TIK	14 aspek		
							Jumlah laporan hasil koordinasi rencana induk dan anggaran SPBE	6 laporan					Jumlah laporan hasil koordinasi rencana induk dan anggaran SPBE	6 laporan		
2	16	03	2.02	0003	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Kab.Ngawi	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1 Unit		688,251,000.00	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Kab.Ngawi	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1 Unit	188,229,000.00	
							Jumlah perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	7 OPD					Jumlah perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	7 OPD		
							Jumlah perangkat daerah pemilik layanan yang memanfaatkan pusat data	7 OPD					Jumlah perangkat daerah pemilik layanan yang memanfaatkan pusat data	7 OPD		
							Jumlah laporan hasil koordinasi pengelolaan pusat data	5 laporan					Jumlah laporan hasil koordinasi pengelolaan pusat data	5 laporan		
2	16	03	2.02	0004	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Kab.Ngawi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	1 dokumen		165,375,000.00	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Kab.Ngawi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	1 dokumen	39,775,000.00	

Kode						Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
								Jumlah fasilitas sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	60 fasilitas				Jumlah fasilitas sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	60 fasilitas		
								Jumlah laporan hasil koordinasi penyelenggaraan komunikasi intra pemerintah daerah	5 laporan				Jumlah laporan hasil koordinasi penyelenggaraan komunikasi intra pemerintah daerah	5 laporan		
2	16	03	2.02	0006	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Kab.Ngawi	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	46 OPD		110,250,000.00	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Kab.Ngawi	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	46 PD	101,240,000.00	
							Jumlah data yang dapat berbagi pakai	22 jenis data					Jumlah data yang dapat berbagi pakai	22 jenis data		
							Jumlah data dan informasi elektronik yang terintegrasi	4 sistem elektronik					Jumlah data dan informasi elektronik yang terintegrasi	4 sistem elektronik		
							Jumlah laporan hasil koordinasi integrasi pelayanan administrasi pemerintahan	4 laporan					Jumlah laporan hasil koordinasi integrasi pelayanan administrasi pemerintahan	4 laporan		
2	16	03	2.02	0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kab.Ngawi	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	22 Unit		385,875,000.00	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kab.Ngawi	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	22 Unit	379,650,000.00	
							Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	13 OPD					Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	13 OPD		

Kode						Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
								Jumlah sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	22 sistem				Jumlah sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	22 sistem		
								Jumlah laporan hasil koordinasi pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik	4 laporan				Jumlah laporan hasil koordinasi pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik	4 laporan		
2	16	03	2.02	0008	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Kab.Ngawi	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	9 layanan	220,500,000.00	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Kab.Ngawi	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	9 layanan	215,186,000.00		
								Jumlah aplikasi yang terintegrasi	4 aplikasi				Jumlah aplikasi yang terintegrasi	4 aplikasi		
								Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	14 layanan				Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	9 layanan		
								Jumlah layanan administrasi pemerintahan (G2G) yang diimplementasikan	9 layanan				Jumlah layanan administrasi pemerintahan (G2G) yang diimplementasikan	14 layanan		
								Jumlah laporan hasil koordinasi penyelenggaraan sistem penghubung layanan pemerintahan	3 laporan				Jumlah laporan hasil koordinasi penyelenggaraan sistem penghubung layanan pemerintahan	3 laporan		
2	16	03	2.02	0009	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Kab.Ngawi	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	1 dokumen	192,937,500.00	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Kab.Ngawi	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	1 dokumen	42,937,500.00		
								Jumlah capaian pilar Smart City yang dikelola dan dikembangkan	2 capaian				Jumlah capaian pilar Smart City yang dikelola dan dikembangkan	2 capaian		

Kode						Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
								Jumlah laporan hasil koordinasi pengembangan dan pengelolaan ekosistem Kabupaten / Kota Cerdas	6 laporan				Jumlah laporan hasil koordinasi pengembangan dan pengelolaan ekosistem Kabupaten / Kota Cerdas	6 laporan		
2	16	03	2.02	0010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Kab.Ngawi	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1 dokumen		320,000,000.00	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Kab.Ngawi	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1 dokumen	193,339,000.00	
							Jumlah ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	20 orang					Jumlah ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	20 orang		
							Jumlah ASN yang mengikuti kegiatan literasi digital atau program pelatihan bidang digital	250 orang					Jumlah ASN yang mengikuti kegiatan literasi digital atau program pelatihan bidang digital	250 orang		
							Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan literasi digital atau program pelatihan bidang digital yang difasilitasi oleh pemerintah daerah	250 orang					Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan literasi digital atau program pelatihan bidang digital yang difasilitasi oleh pemerintah daerah	250 orang		
							Jumlah laporan hasil koordinasi pengembangan dan pengelolaan sumber daya TIK pemerintah daerah	3 laporan					Jumlah laporan hasil koordinasi pengembangan dan pengelolaan sumber daya TIK pemerintah daerah	3 laporan		
2	16	03	2.02	0011	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Kab.Ngawi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	1 dokumen		192,937,500.00	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Kab.Ngawi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	1 dokumen	20,000,000.00	
							Jumlah koordinasi kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan TIK yang ditindaklanjuti	4 kali					Jumlah koordinasi kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan TIK yang ditindaklanjuti	4 kali		
							Jumlah laporan hasil koordinasi pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	4 laporan					Jumlah laporan hasil koordinasi pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	4 laporan		

Kode						Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
2	16	03	2.02	0012		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Kab.Ngawi	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	1 dokumen		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Kab.Ngawi	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	1 dokumen		
2	20							Persentase sistem data statistik sektoral yang terintegrasi	90%				Persentase sistem data statistik sektoral yang terintegrasi	90%		
2	20	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100%	1,016,993,030.00	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100%	200,000,000.00	
								Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100%	-			Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100%	-	
2	20	02	2.01			Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Ngawi	Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral	50%	1,016,993,030.00	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Ngawi	Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral	50%	200,000,000.00	
								Persentase kelengkapan metadata indikator sektoral	50%				Persentase kelengkapan metadata indikator sektoral	50%		
								Persentase survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	50%				Persentase survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	50%		
2	20	02	2.01	0001		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	Kab.Ngawi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1 dokumen	452,124,225.00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	Kab.Ngawi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1 dokumen	76,730,000.00	
								Jumlah laporan hasil koordinasi Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral					Jumlah laporan hasil koordinasi Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral			

Kode						Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
2	20	02	2.01	0002		Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Kab.Ngawi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	26 orang	192,311,000.00	Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Kab.Ngawi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	26 orang	-	
								Jumlah laporan hasil koordinasi Peningkatan kapasitas SDM Pemda	2 laporan				Jumlah laporan hasil koordinasi Peningkatan kapasitas SDM Pemda	2 laporan		
2	20	02	2.01	0003		Membangun Metadata Statistik Sektoral	Kab.Ngawi	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	1 Dokumen	93,085,000.00	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Kab.Ngawi	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	1 Dokumen	-	
								Jumlah laporan hasil koordinasi penyusunan metadata statistik sektoral	2 laporan				Jumlah laporan hasil koordinasi penyusunan metadata statistik sektoral	2 laporan		
2	20	02	2.01	0004		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Kab.Ngawi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	46 orang	-	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Kab.Ngawi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	46 orang	61,770,000.00	
								Jumlah laporan hasil koordinasi peningkatan kapasitas kelembagaan statistik sektoral					Jumlah laporan hasil koordinasi peningkatan kapasitas kelembagaan statistik sektoral			
2	20	02	2.01	0005		Pengembangan Infrastruktur Statistik	Kab.Ngawi	Jumlah Infrastruktur Statistik	1 unit	148,670,000.00	Pengembangan Infrastruktur Statistik	Kab.Ngawi	Jumlah Infrastruktur Statistik	1 unit	-	
								Jumlah laporan hasil koordinasi Pengembangan infrastruktur	1 laporan				Jumlah laporan hasil koordinasi Pengembangan infrastruktur	1 laporan		
2	20	02	2.01	0006		Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Kab.Ngawi	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	1 Dokumen	130,802,805.00	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Kab.Ngawi	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	1 Dokumen	61,500,000.00	
								Jumlah laporan hasil koordinasi penyelenggaraan otorisasi statistik sektoral	1 laporan				Jumlah laporan hasil koordinasi penyelenggaraan otorisasi statistik sektoral	1 laporan		
2	21							Indeks KAMI	350				Indeks KAMI	350		

Kode					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	85%	850,900,000.00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	85%	200,000,000.00	
2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase OPD yang diselenggarakan pengamanan sesuai standard	85%	740,650,000.00	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase OPD yang diselenggarakan pengamanan sesuai standard	85%	167,585,000.00	
2	21	02	2.01	0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Ngawi	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	1 Dokumen	110,250,000.00	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Ngawi	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	1 Dokumen	36,609,500.00	
							Jumlah laporan hasil koordinasi Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2 laporan				Jumlah laporan hasil koordinasi Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2 laporan		
2	21	02	2.01	0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Ngawi	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	55,125,000.00	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Ngawi	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	105,709,500.00	
							Jumlah lulusan sertifikasi yang mengikuti peningkatan kompetensi SDM pengelola keamanan sistem pemerintahan berbasis Elektronik (SPBE)	3 orang				Jumlah lulusan sertifikasi yang mengikuti peningkatan kompetensi SDM pengelola keamanan sistem pemerintahan berbasis Elektronik (SPBE)	3 orang		
							Jumlah peserta sosialisasi tentang proteksi keamanan informasi pemerintah daerah	100 orang				Jumlah peserta sosialisasi tentang proteksi keamanan informasi pemerintah daerah	100 orang		

Kode						Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
								Jumlah laporan hasil koordinasi penyelenggaraan proteksi keamanan informasi pemerintah daerah	4 laporan				Jumlah laporan hasil koordinasi penyelenggaraan proteksi keamanan informasi pemerintah daerah	4 laporan		
								Jumlah peningkatan kompetensi SDM pengelola keamanan siber untuk K/L/D	3 orang				Jumlah peningkatan kompetensi SDM pengelola keamanan siber untuk K/L/D	3 orang		
								Jumlah perangkat keamanan TIK khusus berupa peralatan sandi untuk Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4 unit				Jumlah perangkat keamanan TIK khusus berupa peralatan sandi untuk Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4 unit		
2	21	02	2.01	0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kab.Ngawi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan		303,975,000.00	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kab.Ngawi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	13,900,000.00	
								Jumlah kegiatan strategi yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal	20				Jumlah kegiatan strategi yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal	20		
								Jumlah system elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian	108				Jumlah system elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian	108		
								Jumlah sistem elektronik/aset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	38				Jumlah sistem elektronik/aset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	38		

Kode						Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
								Jumlah laporan hasil Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	4 laporan				Jumlah laporan hasil Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	4 laporan		
								Jumlah Assessment Layanan Keamanan Informasi untuk Perangkat Daerah	1 Laporan				Jumlah Assessment Layanan Keamanan Informasi untuk Perangkat Daerah	1 Laporan		
2	21	02	2.01	0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Ngawi	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	6 OPD		271,300,000.00	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Ngawi	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	6 OPD		11,366,000.00
								Jumlah layanan keamanan informasi pemerintah daerah	2 layanan				Jumlah layanan keamanan informasi pemerintah daerah	2 layanan		
								Jumlah CSIRT yang dibentuk di sektor Pemerintah Daerah	1 CSIRT				Jumlah CSIRT yang dibentuk di sektor Pemerintah Daerah	1 CSIRT		
								Jumlah laporan hasil koordinasi penyelenggaraan layanan keamanan informasi pemerintah daerah	4 laporan				Jumlah laporan hasil koordinasi penyelenggaraan layanan keamanan informasi pemerintah daerah	4 laporan		
2	21	02	2.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase OPD yang dilakukan pengamanan persandian berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan	85%		110,250,000.00	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase OPD yang dilakukan pengamanan persandian berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan	85%		32,415,000.00
2	21	02	2.02	0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Ngawi	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	6 OPD		110,250,000.00	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Ngawi	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	6 OPD		32,415,000.00
								Jumlah Layanan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 layanan				Jumlah Layanan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 layanan		

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
			Jumlah perangkat keamanan TIK dan infrastruktur komunikasi untuk Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	8 unit				Jumlah perangkat keamanan TIK dan infrastruktur komunikasi untuk Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	8 unit		
			Pemeliharaan dan perbaikan peralatan sandi	8 unit				Pemeliharaan dan perbaikan peralatan sandi	8 unit		
			Jumlah laporan hasil koordinasi Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4 laporan				Jumlah laporan hasil koordinasi Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4 laporan		
					17,520,165,210.00						
					{6,317,078,555.00}						11,303,086,655.00

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Dengan berpedoman pada Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 – 2024 dan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Propinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024 agar program kegiatan yang dilaksanakan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi selalu mengacu pada target nasional dan propinsi, maka uraian Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi dapat dilihat pada tabel 3.1 di bawah ini :

RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2020-2024

VISI : Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan berkepribadian berlandaskan Gotong Royong			
MISI :			
1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia. 2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing. 3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan. 4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan. 5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian Bangsa. 6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya 7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada warga 8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya. 9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.			
Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
1. Meningkatkan penyediaan dan pemerataan infrastruktur TIK	1. Meningkatnya cakupan jaringan pita lebar yang cepat dan terjangkau;	Menuntaskan penyediaan internet cepat dan berkualitas di desa yang belum terlayani	1. Mempercepat penyelesaian penyediaan internet cepat dan berkualitas di daerah yang secara ekonomi kurang

berkualitas diseluruh wilayah Indonesia 2. Mendorong percepatan transformasi digital di 3 aspel, bisnis, masyarakat dan pemerintahan , yang ditunjang oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi digital; dan 3. Memperkuat transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik	2. Meningkatnya cakupan wilauah yang terlayani penyiaran digital; 3. Meningkatnya konektivitas layanan pos; 4. Terwujudnya konektivitas Next Generation Broadband Nasional; 5. Meningkatnya pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan kualitas pengelolaan layanan publik bidang pos , telekomunikasi dan informatika; 6. Meningkatnya pemanfaatan TIK disektor ekonomi dan bisnis; 7. Terwujudnya	termasuk lokasi layanan publik	layak bagi operator, termasuk lokasi layanan publik; 2. Mempercepat digitalisasi penyiaran (<i>analog switch off</i>), untuk meraih <i>digital dividend</i> ; dan 3. <i>Farming</i> dan <i>refarming</i> frekuensi untuk layanan internet cepat dan berkualitas.
		Mendorong penerapan teknologi berorientasi ke depan	1. Menata alokasi frekuensi untuk memenuhi kebutuhan implementasi <i>next broadband</i> (5G); 2. Mengembangkan dan mengimplementasikan teknologi 5G nasional; dan 3. Penyediaan teknologi pengendalian konten di internet untuk internet bersih dan aman.
		Mengembangkan SDM talenta digital dan ekosistem	1. Mengakselerasi kompetensi SDM talenta digital dan meningkatkan

	masyarakat yang cerdas digital; 8. Dukungan implementasi digitalisasi pemerintah 9. Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik; 10. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.	ekonomi digital	literasi digital masyarakat; dan 2. Mempercepat transformasi digital pada sektor-sektor ekonomi dan bisnis.
		Integrasi Pusat Data Nasional dan transformasi digital pemerintahan	1. Mempercepat pembangunan dan pemanfaatan Pusat Data Nasional menuju Satu Data Indonesia; dan 2. Mendukung percepatan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
		Mempercepat penyelesaian legislasi primer	Mendorong penyelesaian kebijakan dan regulasi terkait TIK baik Undang-Undang, Perpres, ataupun Peraturan Menteri, meningkatkan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait.

		Melakukan orkestrasi komunikasi publik melibatkan perangkat pemerintah pusat dan daerah	Membangun pengelolaan komunikasi publik yang efektif dan terorganisir; dan Membangun tim yang solid dan responsif dalam mengkonter hoaks dan diseminasi kebijakan pemerintah.
		Meningkatkan kualitas layanan manajemen internal	Mendorong inovasi dalam manajemen internal antara lain penerapan <i>smart services</i> , dan inovasi perencanaan penganggaran.

RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019-2024

VISI : "Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur Yang Adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhlak Dengan Tata Kelola Pemerintahan Yang Partisipatoris Inklusif Melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong Royong"			
MISI 3 : "Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan"			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan Transparansi,	1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur	Mengoptimalkan Kualitas Kinerja Pelayanan Dinas Kominfo

Akses dan Data Sektoral dengan			Provinsi Jawa Timur
Memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pelayanan Publik	2. Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Transparansi, Akses, Interaktivitas Publik dan layanan infrastruktur di Jawa Timur	1. Meningkatkan pemberdayaan lembaga komunikasi publik dalam pelayanan hubungan komunikasi pemerintah	Pengembangan konsep pengelolaan komunikasi publik yang efektif dalam bentuk penyediaan informasi, penyebarluasan informasi dan pelayanan komunikasi
		2. Mengembangkan smart Province yang didasari integrasi aplikasi dan integrasi data	Mengoptimalkan regulasi Pengembangan dan Pemanfaatan Smart Province oleh Perangkat Daerah
	3. Meningkatnya ketersediaan dokumen statistik yang terpercaya dan berkualitas	Meningkatkan pemanfaatan data statistik sektoral yang akurat, akuntabel dan terpercaya dengan berpedoman pada kebijakan Satu Data Prop. Jatim	Mengoptimalkan Pemenuhan Ketersediaan Data Statistik Sektoral yang akurat, akuntabel dan terpercaya
	4. Meningkatnya Kepatuhan Perangkat Daerah terhadap Kebijakan Keamanan Informasi	Meningkatkan kesadaran keamanan informasi kepada Perangkat Daerah dilingkungan Pemprov. Jawa Timur	Standart Keamanan Informasi bagi Perangkat Daerah dilingkungan Pemprov. Jawa Timur

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

Untuk mewujudkan misi ke 3 (tiga) "Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Memberikan Pelayanan Publik yang Prima", maka dilakukan berlandaskan 5 (lima) strategi sebagai berikut :

1. Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi;
2. Meningkatkan pelayanan publik dalam rangka keterbukaan informasi publik melalui pemberdayaan lembaga komunikasi publik
3. Mengembangkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang didasari integrasi aplikasi dan integrasi data
4. Meningkatkan pemanfaatan data statistik sektoral yang akurat, akuntabel dan terpercaya dengan berpedoman pada kebijakan Satu Data Indonesia
5. Meningkatkan kesadaran keamanan informasi kepada Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi.

Dari ke 5 (lima) strategi di atas menjadi rumusan untuk mencapai keberhasilan dari suatu program dan kegiatan yang berlandaskan dan berpedoman pada arah kebijakan sebagai berikut ;

1. Meningkatkan Kualitas Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi;
2. Pengembangan konsep pengelolaan komunikasi publik yang efektif dalam bentuk penyediaan informasi, penyebarluasan informasi dan pelayanan hubungan komunikasi;
3. Mengimplementasikan e – government / SPBE;
4. Mengoptimalkan Pemenuhan Ketersediaan Data Statistik Sektoral yang akurat, akuntabel dan terpercaya;
5. Standart Keamanan Informasi bagi Perangkat Daerah.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan menerapkan strategi dan arah kebijakan, maka Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi mengklasifikasi dan melakukan identifikasi faktor lingkungan internal dan eksternal sebagai berikut :

Faktor Internal			
No	Kekuatan (Strength)	No	Kelemahan (Weakness)
1.	Tersedianya Sumberdaya Manusiayang cukup	1.	Terbatasnya sumberdaya manusia yangtrampil dan profesional
2.	Tersedianya media informasi dankomunikasi untuk didayagunakan	2.	Kurangnya kemampuan memberdayakanpotensi informasi dan komunikasi masyarakat
3.	Tersedianya anggaran	3.	Belum adanya mekanisme SOP Ruang Komando
4.	Tersedianya sarana prasarana yangmemadai	4.	Belum optimalnya tata kelola Data Center
5.	Terbangunnya Smart City	5.	Belum optimalnya pengembangan aplikasiTIK
6.	Adanya regulasi bidang kominfo	6.	Belum optimalnya pengintergrasian sisteminformasi dan data Perangkat Daerah
			Ketersediaan Infrastruktur TIK yang belum merata

Faktor Eksternal			
No	Peluang (Opportunities)	No	Ancaman (Threats)
1.	Komitmen Kepala Daerah mendukung peningkatan TIK	1.	Globalisasi informasi yang berdampak pada keterbukaan informasi publik
2.	Tersedianya perundangan yang mendasari regulasi bidang Kominfo	2.	Pesatnya perkembangan TIK
3.	Kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik	3.	Semakin tingginya pemahaman masyarakat terhadap TIK
4.	Pengembangan dan Pemanfaatan Smart City oleh Perangkat Daerah	4.	Kurangnya Trust (kepercayaan) dari Perangkat Daerah terhadap pengembangan TIK
5.	Program kemenkominfo Indonesiabeas sinyal 2020	5.	Semakin maraknya kejahatan siber
6.	Hubungan kerjasama yang baik dengan instansi vertikal guna peningkatan keamanan informasi	6.	Semakin tingginya informasi yang bersifat hoax di masyarakat
7.	Ketersediaan data statistik sektoral	7.	Data yang tidak akurat dan terpercayakarena tidak updating
8.	Kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi		

Penentuan Strategi Pencapaian Indikator Sasaran

Faktor Eksternal Faktor Internal	Peluang (Opportunities) : 1. Komitmen Kepala Daerah mendukung peningkatan TIK 2. Tersedianya perundangan yang mendasari regulasi bidang Kominfo 3. Kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik 4. Pengembangan dan Pemanfaatan Smart City oleh Perangkat Daerah 5. Program kemenkominfo Indonesiabebebas sinyal 2020 6. Hubungan kerjasama yang baik dengan instansi vertikal guna peningkatan keamanan informasi 7. Tersedianya data statistik sektoral 8. Kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi	Ancaman (Threats) : 1. Globalisasi informasi yang berdampak pada keterbukaan informasi publik 2. Pesatnya perkembangan TIK 3. Semakin tingginya pemahaman masyarakat terhadap TIK 4. Kurangnya Trust (kepercayaan) dari Perangkat Daerah terhadap pengembangan TIK 5. Semakin maraknya kejahatan siber 6. Semakin tingginya informasi yang bersifat hoax di masyarakat 7. Data yang tidak akurat dan terpercayakarena tidak updating
Kekuatan (Strength) : 1. Tersedianya Sumber Daya Manusia yang cukup 2. Tersedianya media informasi dan komunikasi untuk didayagunakan 3. Tersedianya anggaran 4. Tersedianya sarana prasarana yang memadai 5. Terbangunnya smartCity 6. Adanya regulasi bidang kominfo	Alternatif Strategi : 1. Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur Dinas Kominfo Kabupaten Ngawi 2. Meningkatkan pelayanan publik dalam rangka keterbukaan informasi publik melalui pemberdayaan lembaga komunikasi publik 3. Mengembangkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang didasari integrasi aplikasi dan integrasi data 4. Meningkatkan pemanfaatan data statistik sektoral yang akurat, akuntabel dan terpercaya dengan berpedoman pada kebijakan SatuData Indonesia 5. Meningkatkan kesadaran keamanan informasi kepada Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi	Alternatif Strategi : 1. Meningkatkan kemampuan mengintegrasikan Sistem Informasi dalam mendukung pendayagunaan media informasi 2. Meningkatkan kemampuan mengintegrasikan Sistem Informasi dan Database dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik 3. Memberdayakan potensi komunikasi masyarakat melalui pendayagunaan media informasi 4. Meningkatkan diseminasi informasi melalui pendayagunaan media informasi untuk mengurangi kesenjangan informasi 5. Meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan aplikasi TIK dalam rangka mengembangkan muatan e-government dan kualitas pelayanan publik 6. Memberdayakan potensi komunikasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik

Kelemahan (Weakness) :	Alternatif Strategi :	Alternatif Strategi :
1. Terbatasnya sumberdaya manusia yang trampil dan profesional 2. Kurangnya kemampuan memberdayakan potensi informasi dan komunikasi masyarakat 3. Belum adanya mekanisme SOP Ruang Komando 4. Belum optimalnya tatakelola Data Center 5. Belum optimalnya pengembangan aplikasi TIK 6. Belum optimalnya pengintegrasian sistem informasi dan data Perangkat Daerah	1. Mengoptimalkan SDM dalam menghadapi Globalisasi informasi 2. Mengembangkan kapasitas SDM aparatur dan masyarakat dalam bidang Kominfo yang siap menghadapi globalisasi dan keterbukaan informasi 3. Meningkatkan kebutuhan SDM untuk mengurangi Kesenjangan informasi dimasyarakat 4. Meningkatkan sarana prasarana guna menunjang kebutuhan Globalisasi informasi yang berdampak pada keterbukaan informasi publik 5. Menyusun rencana induk Smart City 6. Meningkatkan kualitas SDM yang adadengan Bimbingan teknis bidang statistik	1. Mengembangkan sistem Informasi dalam menghadapi globalisasi yang berdampak pada keterbukaan informasi publik 2. Meningkatkan pemberdayaan potensi dan lembaga komunikasi masyarakat dalam menghadapi globalisasi dan keterbukaan informasi 3. Meningkatkan kemampuan potensi informasi masyarakat untuk mengurangi kesenjangan informasi 4. Meningkatkan infrastruktur TIK yang menunjang kebutuhan integrasi sistem informasi dan database dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik 5. Meningkatkan pemberdayaan potensi informasi masyarakat dalam menghadapi globalisasi informasi 6. Pengembangan dan pemanfaatan Smart City

Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dapat dilihat pada tabel 3.2 dibawah ini :

Tabel 3.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : " SEMESTA BERENCANA " "Terwujudnya masyarakat Kabupaten Ngawi yang mandiri, berakhlak, makmur dan berdaya saing berbasis agropolitan dengan semangat gotong royong dalam bingkai NKRI"			
MISI : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Memberikan Pelayanan Publik yang Prima			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan	Meningkatkan implementasi e-government dalam penyelenggaraan pemerintahan dan	1. Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur Dinas Kominfo Kabupaten Ngawi 2. Meningkatkan pelayanan publik dalam rangka keterbukaan informasi publik melalui pemberdayaan lembaga komunikasi publik	Meningkatkan Kualitas Kinerja Pelayanan Dinas Kominfo Kabupaten Ngawi Pengembangan konsep pengelolaan komunikasi publik yang efektif dalam bentuk penyediaan informasi, penyebarluasan informasi dan pelayanan

	pelayanan publik	3. Mengembangkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang didasari integrasi aplikasi dan integrasi data	hubungan komunikasi Mengimplementasikan e - Government / SPBE
	Mewujudkan sistem data yang terintegrasi secara sistematis	Meningkatkan pemanfaatan data statistik sektoral yang akurat, akuntabel dan terpercaya dengan berpedoman pada kebijakan Satu Data Indonesia	Mengoptimalkan Pemenuhan Ketersediaan Data Statistik Sektoral yang akurat, akuntabel dan terpercaya
	Meningkatkan keamanan informasi pemerintah daerah	Meningkatkan kesadaran keamanan informasi kepada Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi	Standart Keamanan Informasi bagi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN

Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan :

Dalam rangka pencapaian visi : “Terwujudnya masyarakat Kabupaten Ngawi yang mandiri, berakhlak, makmur dan berdaya saing berbasis agropolitan dengan semangat gotong royong dalam bingkai NKRI” , Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian mengampu misi ke 3 yaitu Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Memberikan Pelayanan Publik yang Prima. Strategi yang diambil Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dalam rangka untuk pencapaian Indikator Kinerja Utama ; Nilai LHE Akip, Cakupan Layanan Telekomunikasi, Persentase sistem data statistik sektoral yang terintegrasi, Indeks KAMI adalah dengan ; meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana jaringan infrastruktur yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan dan meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan aplikasi TIK dalam rangka mengembangkan muatan e – government dan kualitas pelayanan publik.

Jumlah program keseluruhan ada 5 program , 14 kegiatan dan 58 sub kegiatan direncanakan untuk tahun 2024 dimana untuk pelaksanaan program kegiatan menyebar dengan sasaran seluruh perangkat daerah dan masyarakat Kabupaten Ngawi sehingga semua bisa mengikuti kemajuan dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sehingga diharapkan semua kalangan masyarakat bisa mendapatkan pelayanan publik yang baik dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Total keseluruhan pagu untuk tahun 2023 adalah sebesar Rp. 9.746.199.866,-. Ada beberapa rumusan program dan kegiatan yang tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD dikarenakan ada beberapa program kegiatan yang di tunda terlebih dahulu karena keterbatasan anggaran dan prioritas kegiatan dalam pencapaian target Indikator Kinerja Utama.

Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2024 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dapat dilihat pada tabel 4.1 di bawah ini

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika,Statistik dan Persandian Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Ngawi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				11,303,086,655.00			4.45	18,156,152,812.00
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				10,903,086,655.00			2.60	16,157,783,322.00
2	16	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun		100%	6,883,293,655.00			100%	7,080,738,322.00
2	16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja OPD yang disusun tepat waktu		100%	11,998,000.00			100%	65,415,000.00
2	16	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian	11 Dokumen	1,720,000.00	PENDAPATAN TRANSFER		11 Dokumen	16,115,000.00
2	16	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian	1 Dokumen	1,215,000.00	PENDAPATAN TRANSFER		1 Dokumen	5,500,000.00
2	16	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian	1 Dokumen	1,215,000.00	PENDAPATAN TRANSFER		1 Dokumen	5,500,000.00
2	16	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian	2 Dokumen	2,240,000.00	PENDAPATAN TRANSFER		2 Dokumen	11,000,000.00
2	16	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian	2 Dokumen	2,240,000.00	PENDAPATAN TRANSFER		2 Dokumen	5,500,000.00
2	16	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian	6 laporan	3,368,000.00	PENDAPATAN TRANSFER		6 laporan	21,800,000.00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu		100%	5,763,974,549.00			100%	5,706,909,008.00
2	16	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	1.430 Orang/bulan	5,756,214,549.00	PENDAPATAN TRANSFER		1.430 Orang/bulan	5,679,529,008.00
						Jumlah dokumen pengajuan gaji dan tunjangan ASN dan Non ASN yang disusun		26 dok				26 dok	
2	16	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	1 laporan	2,780,000.00	PENDAPATAN TRANSFER		1 laporan	12,000,000.00
2	16	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	50 laporan	4,980,000.00	PENDAPATAN TRANSFER		50 laporan	15,380,000.00
					Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Capaian realisasi retribusi daerah terhadap target tahun berkenaan			-			100%	
					Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi daerah	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian		-	PENDAPATAN TRANSFER		12 dok	
2	16	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang terpenuhi administrasi kepegawaiannya dalam setahun		100%	-			100%	45,806,000.00
2	16	01	2.05	0001	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		1 paket	-			1 paket	16,000,000.00
2	16	01	2.05	0010	Sosialisasi peraturan perundang - undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		57 orang	-			50 orang	29,806,000.00
2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum dalam setahun		100%	158,996,726.00			100%	162,018,000.00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2	16	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian	1 paket	3,144,000.00	PENDAPATAN TRANSFER		1 paket	10,706,000.00
2	16	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian	1 paket	54,183,440.00	PENDAPATAN TRANSFER		1 paket	40,000,000.00
2	16	01	2.06	0003	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian	1 paket	1,992,000.00	PENDAPATAN TRANSFER		1 paket	21,400,000.00
						Jumlah minuman yang disediakan							
						Jumlah air isi ulang yang disediakan							
2	16	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian	1 paket	9,438,000.00	PENDAPATAN TRANSFER		1 paket	10,700,000.00
						Jumlah barang yang digandakan		12000 lembar				12000 lembar	
2	16	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian	24 dokumen	1,980,000.00	PENDAPATAN TRANSFER		24 dokumen	4,212,000.00
2	16	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian	3 laporan	1,300,000.00	PENDAPATAN TRANSFER		3 laporan	
						Jumlah mamin Kunjungan Tamu yang disediakan		60 kotak				60 kotak	
2	16	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian	90 laporan	86,959,286.00	PENDAPATAN TRANSFER		90 laporan	75,000,000.00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
						Jumlah mamin Rapat SKPD yang disediakan		150 kotak				150 kotak	
2	16	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan sesuai dengan kebutuhan dalam setahun	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian	100%	472,468,000.00	PENDAPATAN TRANSFER		100%	244,653,000.00
2	16	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian	1 unit	472,468,000.00	PENDAPATAN TRANSFER		5unit	90,000,000.00
2	16	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		3 unit	-			-	-
2	16	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian	5 unit	-	PENDAPATAN TRANSFER		1 paket	12,400,000.00
2	16	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		10 unit	-			10 unit	81,125,000.00
2	16	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		2unit	-			2unit	22,155,000.00
2	16	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1 unit	-			1 unit	38,973,000.00
2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	100%	388,276,380.00	PENDAPATAN TRANSFER		100%	451,761,314.00
2	16	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian	1 laporan	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 laporan	3,100,000.00
2	16	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian	1 laporan	246,036,380.00	PENDAPATAN TRANSFER		1 laporan	294,867,814.00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
						Jumlah penambahan daya listrik		-					
						Jumlah pemasangan daya listrik		-					
						Jumlah iklan/publikasi media cetak dan elektronik		-				-	
2	16	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian	1 laporan	64,800,000.00	PENDAPATAN TRANSFER		1 laporan	71,662,500.00
2	16	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian	1 laporan	77,440,000.00	PENDAPATAN TRANSFER		1 laporan	82,131,000.00
2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara dalam setahun	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian	100%	87,580,000.00	PENDAPATAN TRANSFER		100%	404,176,000.00
2	16	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian	1unit	2,000,000.00	PENDAPATAN TRANSFER		1unit	32,133,000.00
2	16	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian	4unit	16,500,000.00	PENDAPATAN TRANSFER		4unit	53,500,000.00
2	16	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		36 unit	-			15 unit	52,010,000.00
2	16	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian	2 unit	19,080,000.00	PENDAPATAN TRANSFER		60kali	266,533,000.00
2	16	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara		-					
2	16	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian	1 unit	40,000,000.00	PENDAPATAN TRANSFER		2 unit	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2	16	01	2.09	0012	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian	1 unit	10,000,000.00	PENDAPATAN TRANSFER		-	
												-	
									4,019,793,000.00				
2	16	02			PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase (%) konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah, counter narasi negatif, hoax, dan informasi misleading terhadap pemerintah daerah yang didiseminasikan sesuai dengan strategi komunikasi		75%	819,170,000.00			75%	3,518,884,500.00
2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	Kab.Ngawi	85%	819,170,000.00	PENDAPATAN TRANSFER		85%	3,518,884,500.00
						Persentase (%) Informasi Publik yang disediakan dan diumumkan oleh Provinsi dan kab/kota sesuai amanat UU No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik		79%				79%	
						Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Tingkat Kecamatan		90%				90%	
2	16	02	2.01	0001	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik		1 dokumen	-			1 dokumen	10,100,000.00
2	16	02	2.01	0002	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Kab.Ngawi	1 dokumen	50,550,000.00	PENDAPATAN TRANSFER		1 dokumen	235,270,500.00
						Jumlah fasilitasi Pengembangan SDM bagi admin SP4N-Lapor		4 kali				4 kali	
						Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti		90 aduan				90 aduan	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
						Jumlah peserta sosialisasi Kanal SP4N-LAPOR! Di tingkat desa dan Kecamatan		250 orang				250 orang	
						Jumlah peserta admin SP4N-LAPOR!		48 orang				48 orang	
						Jumlah laporan hasil koordinasi pengaduan / aspirasi publik		4 laporan				4 laporan	
2	16	02	2.01	0003	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah		1 dokumen	-			1 dokumen	16,702,000.00
						Jumlah agenda prioritas pemerintah daerah yang terpublikasi		70 agenda				70 agenda	
						Jumlah laporan monitoring dan evaluasi yang ditindaklanjuti		4 laporan				4 laporan	
2	16	02	2.01	0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Kab.Ngawi	1 dokumen	20,248,000.00	PENDAPATAN TRANSFER		1 dokumen	72,380,000.00
						Jumlah konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)		15 konten				15 konten	
						Jumlah peserta bimtek pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik		50 orang				50 orang	
						Jumlah laporan hasil koordinasi pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik		4 laporan				4 laporan	
2	16	02	2.01	0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kab.Ngawi	1 dokumen	82,730,000.00	PENDAPATAN TRANSFER		1 dokumen	515,852,000.00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
						Jumlah komunitas masyarakat / mitra strategis pemerintah daerah kabupaten/kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota		6 komunitas				6 komunitas	
						Jumlah fasilitasi penyiaran media yang dilaksanakan		5 kali				5 kali	
						Jumlah media komunikasi publik yang dikelola		10 media				10 media	
						Jumlah peralatan studio yang diadakan		4 unit				4 unit	
						Jumlah laporan hasil koordinasi pengelolaan media komunikasi publik		4 laporan				4 laporan	
2	16	02	2.01	0006	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Kab.Ngawi	1 dokumen	50,850,000.00	PENDAPATAN TRANSFER		1 dokumen	240,000,000.00
						Jumlah diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan		4diseminasi				4diseminasi	
						Jumlah Daftar Informasi Publik OPD yang dimutakhirkan		4 daftar				4 daftar	
						Jumlah Daftar Informasi Publik yang disosialisasikan		4 daftar				4 daftar	
						Jumlah Daftar Informasi Publik yang tersaji di halaman website PPID OPD		4 daftar				4 daftar	
						Jumlah peserta Bimtek untuk penguatan PPID di OPD,Kecamatan dan Desa		150 orang				150 orang	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
						Jumlah layanan informasi terkait NTPD yang ditindaklanjuti		100%				100%	
						Jumlah laporan hasil koordinasi pelayanan informasi publik		12 laporan				12 laporan	
2	16	02	2.01	0007	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	Kab.Ngawi	10 layanan	75,000,000.00	PENDAPATAN TRANSFER		1 dokumen	111,352,500.00
						Jumlah laporan hasil koordinasi pengelolaan layanan hubungan media		10 laporan				10 laporan	
2	16	02	2.01	0008	Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Kab.Ngawi	1 dokumen	71,889,000.00	PENDAPATAN TRANSFER		1 dokumen	144,703,000.00
						Jumlah kegiatan fasilitasi bagi mitra strategis pemda (media komunitas seperti KIM, dll) termasuk media lokal yang melaksanakan diseminasi informasi kebijakan dan program prioritas nasional dan prioritas daerah		6 kegiatan				6 kegiatan	
						Jumlah peserta bimtek pemberdayaan Sumber Daya Kelompok Informasi Masyarakat		150 orang				150 orang	
						Jumlah laporan hasil koordinasi pengelolaan informasi publik		12 laporan				12 laporan	
2	16	02	2.01	0009	Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis	Kab.Ngawi	1 dokumen	12,518,000.00	PENDAPATAN TRANSFER		1 dokumen	100,000,000.00
						Jumlah peserta bimtek penguatan pengelolaan/penanganan komunikasi krisis		120 orang				120 orang	
						Jumlah media komunikasi yang digunakan sebagai sarana pengelolaan komunikasi krisis		4 media komunikasi				4 media komunikasi	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
						Jumlah Monev dan laporan terkait pengelolaan komunikasi krisis		4 laporan				4 laporan	
2	16	02	2.01	0010	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang meningkat Kapasitasnya	Kab.Ngawi	5 orang	169,336,000.00	PENDAPATAN TRANSFER		1 dokumen	686,746,000.00
						Jumlah publikasi melalui iklan layanan masyarakat		30 iklan				30 iklan	
						Jumlah peserta bimtek penguatan sumber daya komunikasi publik		100 orang				100 orang	
						Jumlah sarana dan prasarana publikasi yang diadakan		12 unit				12 unit	
						Jumlah laporan hasil koordinasi penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik		4 laporan				4 laporan	
2	16	02	2.01	0011	Penguatan tata kelola Komisi Informasi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Kab.Ngawi	1 dokumen	8,600,000.00	PENDAPATAN TRANSFER		1 dokumen	49,733,500.00
						Jumlah Monev dan laporan terkait Penguatan Komunikasi Informasi di Daerah		4 laporan					
						Jumlah peserta bimtek, sosialisasi, FGD terkait Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah		50 orang				50 orang	
						Jumlah sarana prasarana alat kelengkapan maupun pendukung terkait Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah		4 unit				4 unit	
2	16	02	2.01	0012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	Kab.Ngawi	1 dokumen	277,449,000.00	PENDAPATAN TRANSFER		1 dokumen	1,336,045,000.00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
						Jumlah publikasi penyelenggaraan pemerintah daerah melalui media elektronik		5 media				5 media	
						Jumlah publikasi penyelenggaraan pemerintah daerah melalui media cetak		50 media				50 media	
						Jumlah media yang difasilitasi pemerintah daerah		38 media				38 media	
						Jumlah peserta Bimtek jurnalistik		100 orang				100 orang	
						Jumlah sarana dan prasarana jurnalistik yang diadakan		3 unit				3 unit	
						Jumlah laporan hasil koordinasi penyelenggaraan humas dan media		50 laporan				50 laporan	
2	16	02	2.01	0013	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Ngawi	5 unit				5 unit	
2	16	03			PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase layanan e - government yang terintegrasi		85%	3,200,623,000.00			85%	5,558,160,500.00
2	16	03	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo		90%	1,691,051,500.00			90%	2,674,982,500.00
						Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar		90%				90%	
2	16	03	2.01	0001	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten / Kota	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab.Ngawi	259 Domain	91,000,000.00	PENDAPATAN TRANSFER		200 situs	167,012,500.00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
						Jumlah laporan hasil koordinasi pendaftaran nama domain pemerintah daerah		4 laporan				4 laporan	
2	16	03	2.01	0002	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Ngawi	3 dokumen	33,451,500.00	PENDAPATAN TRANSFER		3 dokumen	167,012,500.00
						Jumlah kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015		95				95	
						Jumlah laporan hasil koordinasi penatalaksanaan nama domain pemerintah daerah		4 laporan				4 laporan	
2	16	03	2.01	0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kab.Ngawi	27 unit	1,566,600,000.00	PENDAPATAN TRANSFER		27 unit	2,340,957,500.00
						Jumlah perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah ataumenggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo		46 OPD				46 OPD	
						Jumlah PD yang memiliki akses internet dan terhubung dengan jaringan intra pemerintah		46 OPD				46 OPD	
						Besaran bandwidth yang disediakan		2,5 giga				2,5 giga	
						Jumlah pemeliharaan infrastruktur TIK		53 kali				53 kali	
						Jumlah laporan hasil koordinasi infrastruktur TIK		10 laporan				10 laporan	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2	16	03	2.02		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	Kab.Ngawi	90%	1,509,571,500.00	PENDAPATAN TRANSFER		90%	2,883,178,000.00
						Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah		90%				90%	
						Persentase (%) Perangkat Daerah yang mengimplementasi/replikasi inovasi yang mendukung smart city sesuai dengan Masterplan		90%				90%	
2	16	03	2.02	0001	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E -Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Ngawi	2 dokumen	154,215,000.00	PENDAPATAN TRANSFER		2 dokumen	222,705,000.00
						Nilai indeks domain kebijakan dan tata kelola SPBE		3.3				3.3	
						Jumlah laporan hasil koordinasi penatalaksanaan e - government		6 laporan				6 laporan	
2	16	03	2.02	0002	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kab.Ngawi	1 dokumen	175,000,000.00	PENDAPATAN TRANSFER		1 dokumen	334,057,500.00
						Jumlah aspek dalam arsitektur SPBE Pemkab Ngawi yang didukung anggaran bidang TIK		14 aspek				14 aspek	
						Jumlah laporan hasil koordinasi rencana induk dan anggaran SPBE		6 laporan				6 laporan	
2	16	03	2.02	0003	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Kab.Ngawi	1 Unit	188,229,000.00	PENDAPATAN TRANSFER		1 Unit	722,663,500.00
						Jumlah perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah		7 OPD				7 OPD	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
						Jumlah perangkat daerah pemilik layanan yang memanfaatkan pusat data		7 OPD				7 OPD	
						Jumlah laporan hasil koordinasi pengelolaan pusat data		5 laporan				5 laporan	
2	16	03	2.02	0004	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Kab.Ngawi	1 dokumen	39,775,000.00	PENDAPATAN TRANSFER		1 dokumen	167,028,500.00
						Jumlah fasilitas sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan		60 fasilitas				60 fasilitas	
						Jumlah laporan hasil koordinasi penyelenggaraan komunikasi intra pemerintah daerah		5 laporan				5 laporan	
2	16	03	2.02	0006	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Kab.Ngawi	46 PD	101,240,000.00	PENDAPATAN TRANSFER		46 OPD	111,352,500.00
						Jumlah data yang dapat berbagi pakai		22 jenis data				22 jenis data	
						Jumlah data dan informasi elektronik yang terintegrasi		4 sistem elektronik				4 sistem elektronik	
						Jumlah laporan hasil koordinasi integrasi pelayanan administrasi pemerintahan		4 laporan				4 laporan	
2	16	03	2.02	0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Kab.Ngawi	22 Unit	379,650,000.00	PENDAPATAN TRANSFER		22 Unit	389,734,000.00
						Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan		13 OPD				13 OPD	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
						Jumlah sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan		22 sistem				22 sistem	
						Jumlah laporan hasil koordinasi pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik		4 laporan				4 laporan	
2	16	03	2.02	0008	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Kab.Ngawi	9 layanan	215,186,000.00	PENDAPATAN TRANSFER		9 layanan	222,705,000.00
						Jumlah aplikasi yang terintegrasi		4 aplikasi				4 aplikasi	
						Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi		9 layanan				14 layanan	
						Jumlah layanan administrasi pemerintahan (G2G) yang diimplementasikan		14 layanan				9 layanan	
						Jumlah laporan hasil koordinasi penyelenggaraan sistem penghubung layanan pemerintahan		3 laporan				3 laporan	
2	16	03	2.02	0009	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan <i>Masterplan Smart City</i>	Kab.Ngawi	1 dokumen	42,937,500.00	PENDAPATAN TRANSFER		1 dokumen	194,866,000.00
						Jumlah capaian pilar Smart City yang dikelola dan dikembangkan		2 capaian				2 capaian	
						Jumlah laporan hasil koordinasi pengembangan dan pengelolaan ekosistem Kabupaten / Kota Cerdas		6 laporan				6 laporan	
2	16	03	2.02	0010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Kab.Ngawi	1 dokumen	193,339,000.00	PENDAPATAN TRANSFER		1 dokumen	323,200,000.00
						Jumlah ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo		20 orang				20 orang	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
						Jumlah ASN yang mengikuti kegiatan literasi digital atau program pelatihan bidang digital yang difasilitasi oleh pemerintah daerah		250 orang				250 orang	
						Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan literasi digital atau program pelatihan bidang digital yang difasilitasi oleh pemerintah daerah		250 orang				250 orang	
						Jumlah laporan hasil koordinasi pengembangan dan pengelolaan sumber daya TIK pemerintah daerah		3 laporan				3 laporan	
2	16	03	2.02	0011	Pengelolaan <i>Government Chief Information Officer (GCIO)</i>	Jumlah Dokumen Pengelolaan <i>Government Chief Information Officer (GCIO)</i>	Kab.Ngawi	1 dokumen	20,000,000.00	PENDAPATAN TRANSFER		1 dokumen	194,866,000.00
						Jumlah koordinasi kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan TIK yang ditindaklanjuti		4 kali				4 kali	
						Jumlah laporan hasil koordinasi pengelolaan <i>Government Chief Information Officer (GCIO)</i>		4 laporan				4 laporan	
2	16	03	2.02	0012	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE		1 dokumen				1 dokumen	
2	20												
2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Kab.Ngawi	100%	200,000,000.00	PENDAPATAN TRANSFER		100%	1,128,108,490.00
						Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah		100%	-			100%	
2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral	Kab.Ngawi	50%	200,000,000.00	PENDAPATAN TRANSFER		50%	1,128,108,490.00
						Persentase kelengkapan metadata indikator sektoral		50%				50%	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
						Persentase survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS		50%				50%	
2	20	02	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Kab.Ngawi	1 dokumen	76,730,000.00	PENDAPATAN TRANSFER		1 dokumen	277,336,400.00
						Jumlah laporan hasil koordinasi Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral							
2	20	02	2.01	0002	Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi		26 orang	-			26 orang	101,542,100.00
						Jumlah laporan hasil koordinasi Peningkatan kapasitas SDM Pemda		2 laporan				2 laporan	
2	20	02	2.01	0003	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun		1 Dokumen	-			1 Dokumen	212,393,500.00
						Jumlah laporan hasil koordinasi penyusunan metadata statistik sektoral		2 laporan				2 laporan	
2	20	02	2.01	0004	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	Kab.Ngawi	46 orang	61,770,000.00	PENDAPATAN TRANSFER		46 orang	220,000,000.00
						Jumlah laporan hasil koordinasi peningkatan kapasitas kelembagaan statistik sektoral							
2	20	02	2.01	0005	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Statistik		1 unit	-			1 unit	165,537,000.00
						Jumlah laporan hasil koordinasi Pengembangan infrastruktur		1 laporan				1 laporan	
2	20	02	2.01	0006	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	Kab.Ngawi	1 Dokumen	61,500,000.00	PENDAPATAN TRANSFER		1 Dokumen	151,299,490.00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
						Jumlah laporan hasil koordinasi penyelenggaraan otorisasi statistik sektoral		1 laporan				1 laporan	
2	21												
2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah		85%	200,000,000.00			85%	870,261,000.00
2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang diselenggarakan pengamanan sesuai standard		85%	167,585,000.00			85%	758,908,500.00
2	21	02	2.01	0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Kab.Ngawi	1 Dokumen	36,609,500.00	PENDAPATAN TRANSFER		1 Dokumen	111,352,500.00
						Jumlah laporan hasil koordinasi Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		2 laporan				2 laporan	
2	21	02	2.01	0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Ngawi	1 Laporan	105,709,500.00	PENDAPATAN TRANSFER		1 Laporan	55,676,000.00
						Jumlah lulusan sertifikasi yang mengikuti peningkatan kompetensi SDM pengelola keamanan sistem pemerinthan berbasis Eklektronik (SPBE)		3 orang				3 orang	
						Jumlah peserta sosialisasi tentang proteksi keamanan informasi pemerintah daerah		100 orang				100 orang	
						Jumlah laporan hasil koordinasi penyelenggaraan proteksi keamanan informasi pemerintah daerah		4 laporan				4 laporan	
						Jumlah peningkatan kompetensi SDM penglola keamanan siber untuk K/L/D		3 orang				3 orang	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
						Jumlah perangkat keamanan TIK khusus berupa peralatan sandi untuk Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		4 unit				4 unit	
2	21	02	2.01	0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kab.Ngawi	1 Laporan	13,900,000.00	PENDAPATAN TRANSFER		1 Laporan	307,015,000.00
						Jumlah kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal		20				20	
						Jumlah system elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian		108				108	
						Jumlah sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah		38				38	
						Jumlah laporan hasil Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik		4 laporan				4 laporan	
						Jumlah Assessment Layanan Keamanan Informasi untuk Perangkat Daerah		1 Laporan				1 Laporan	
2	21	02	2.01	0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Kab.Ngawi	6 OPD	11,366,000.00	PENDAPATAN TRANSFER		6 OPD	284,865,000.00
						Jumlah layanan keamanan informasi pemerintah daerah		2 layanan				2 layanan	
						Jumlah CSIRT yang dibentuk di sektor Pemerintah Daerah		1 CSIRT				1 CSIRT	
						Jumlah laporan hasil koordinasi penyelenggaraan layanan keamanan informasi pemerintah daerah		4 laporan				4 laporan	

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
								Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		
2	21	02	2.02			Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang dilakukan pengamanan persandian berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan		85%	32,415,000.00			85%	111,352,500.00		
2	21	02	2.02	0001		Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	Kab.Ngawi	6 OPD	32,415,000.00	PENDAPATAN TRANSFER		6 OPD	111,352,500.00		
							Jumlah Layanan Operasioalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		1 layanan				1 layanan			
							Jumlah perangkat keamanan TIK dan infrastruktur komunikasi untuk Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		8 unit				8 unit			
							Pemeliharaan dan perbaikan peralatan sandi		8 unit				8 unit			
							Jumlah laporan hasil koordinasi Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		4 laporan				4 laporan			
									11,303,086,655.00				18,156,152,812.00			

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi Tahun 2023 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dalam melaksanakan tugas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang komunikasi dan informatika. Rencana Kerja ini merupakan penjabaran dari visi dan misi yang mengacu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026.

Ada beberapa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, karena ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan maka ada beberapa kegiatan yang pelaksanaannya dilaksanakan secara bertahap dengan tetap mengutamakan pelayanan prima ke masyarakat dan perangkat daerah, prioritas program dan kegiatan didasarkan pada urgensi peruntukannya, sehingga harus ada yang diprioritaskan terlebih dahulu sesuai rencana aksi yang telah disusun sesuai dengan target pencapaian kinerja utama Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian. Rencana tindak lanjut pelaksanaan program dan kegiatan sudah tersusun sesuai rencana aksi dan aliran kas sehingga diharapkan apa yang menjadi target indikator kinerja bisa terlaksana sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Rencana Kerja Tahun 2024 disusun berdasarkan evaluasi capaian kinerja tahun 2022 dan perkiraan capaian tahun 2023 dan penyelesaian target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2021 - 2026, sehingga apa yang menjadi kekurangan / catatan di tahun 2022 dan 2023 bisa menjadi acuan untuk keberhasilan di tahun 2024.

Akhir kata semoga Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance*.



The image shows the official purple circular stamp of the Bupati (Regent) of Ngawi. The stamp contains the text "BUPATI NGAWI" at the top and "ONY ANWAR HARSONO" at the bottom. A black ink signature is written over the stamp.